



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

JL. LINGKAR BARAT III RT.9 KEL.
SIMPANG RIMBO KEC. ALAM BARAJO
KOTA JAMBI 36124

TELP : (0741) 3081183
FAX : (0741) 3081183

EMAIL : bptd-jambi@dephub.go.id

Nomor : UM.006/5/6/BPTD-JAMBI/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring Capaian
Kinerja (LMCK) Triwulan III Tahun 2025

Jambi, 10 Oktober 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: PR.202/2/6/DJPD/2025 Tanggal 29 September 2025 Hal Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan III Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan III Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai,



Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Darat.



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Pande Gede Semarapura	Penelaah Teknis Kebijakan	9/10 2025	
		Dina Safitri	Penata Layanan Operasional	9/10, 2025	
2.	Diperiksa	Alexander T.P Pardede	Kepala Subbagian Tata Usaha	9/10, 2025	
3.	Disetujui	Alexander T.P Pardede	Kepala Subbagian Tata Usaha	9/10, 2025	
		Herry Wanda	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	9/10, 2025	
		Efrimon, S.SiT., M.M.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	9/10, 2025	
		Riskan, A.Md LLAJ, S.E., M.M.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	9/10 2025	



LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



TRIWULAN III | 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



• KATA

PENGANTAR



KATA PENGANTAR

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.





Adapun isi dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III ini mencakup Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025, serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2025.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Dibuat di Jambi
Pada tanggal 10 Oktober 2025

Kepala Balai,

Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007



• RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF



Revisi I Pejanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025 memuat 6 (enam) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK;
2. Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan;
3. Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang;
4. Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi *active* dan *passive safety*;
5. Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan;
6. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub.

Dari tujuan diatas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada Tahun 2025 ditetapkan 6 (enam) Sasaran Kegiatan (SK) dan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sudah baik.

Total 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi tahun 2025 terdapat 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan sama dengan 100% ($IKP=100\%$) dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan terealisasi sebesar 9 Trayek (target 9 Trayek);
2. Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM belum ada realisasi (target 1 Unit);
3. Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM terealisasi 4 Unit (target 4 Unit);
4. Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM terealisasi sebesar 1 Lokasi (target 3 Lokasi);

5. Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM terealisasi 1 Tahun (target 1 Tahun);
6. Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok terealisasi 3 Kegiatan (target 3 Kegiatan);
7. Penyusunan Dokumen Terkait TUSI terealisasi belum ada realisasi (target 2 Kegiatan);
8. Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata terealisasi 4 Kegiatan (target 4 Kegiatan);
9. Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri belum ada realisasi (target 2 Kegiatan);
10. Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin belum ada realisasi (target 2 Kegiatan);
11. Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan belum ada realisasi (target 2 Kegiatan);
12. Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan terealisasi 2 Kegiatan (target 2 Kegiatan)
13. Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan terealisasi 3 Lokasi (Target 3 Lokasi);
14. Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman terealisasi 76 Kegiatan (72 Kegiatan);
15. Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah terealisasi 3 Kegiatan (Target 8 Kegiatan);
16. Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda terealisasi 203 Orang (Target 200 Orang);
17. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 2 Kegiatan (Target 3 Kegiatan);
18. Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 1 Dokumen (Target 1 Dokumen);
19. Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan terealisasi 2 Kegiatan (Target 2 Kegiatan);
20. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 1 Kegiatan (Target 1 Kegiatan);
21. Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan terealisasi 1 Kegiatan (Target 1 Dokumen);
22. Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 2 Dokumen (Target 2 Dokumen);
23. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 2 Kegiatan (Target 2 Kegiatan);
24. Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) terealisasi 1 Kegiatan (Target 1 Kegiatan);
25. Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi 2 Kegiatan (Target 2 Kegiatan);

26. Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja terealisasi 2 Kegiatan (Target 2 Kegiatan);
27. Kegiatan mendukung Pembangunan ZI terealisasi 1 Kegiatan (Target 1 Kegiatan).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi pada Tahun 2025. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.2.1. Bagan Struktur Organisasi	5
I.3. Sumber Daya Manusia.....	6
I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	7
I.5. Sistematika Laporan.....	8
I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	15
I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	18
I.8. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	22
 BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	
II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	26
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja	26
2.3.1 SK 2 Meningkatkan Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK.....	32
IKK2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan.....	32
2.3.2 SK 7 Meningkatkan pelayanan publik sektor transportasi Jalan	36
IKK7.1 Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanan nya untuk Memenuhi SPM	37
IKK7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	40
IKK7.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM.....	43
IKK7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	46
IKK7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok.....	50
IKK7.7 Penyusunan Dokumen Terkait TUSI.....	53
2.3.3 SK 9 Meningkatkan Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	56
IKK9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	56
IKK9a Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri.....	60
IKK9b Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin.....	62
IKK9c Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan.....	65
IKK9d Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	68
IKK9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan.....	71
2.3.4 SK 10 Meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi <i>active</i> dan <i>passive safety</i>	75
IKK10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	75
IKK10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah ...	78

2.3.5 SK 12	Meningkatnya kesadaran & <i>attitude</i> pengguna jalan berkeselamatan	81
IKK12.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	81
2.3.6 IKP4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	84
IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat.....	84
IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat.....	87
IKK 4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	90
IKK 4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat.....	93
IKK 4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan.....	96
IKK 4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat ...	99
IKK 4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat.....	102
IKK 4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	105
IKK 4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	107
IKK 4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	110
IKK 4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	113
II.3.	Realisasi Anggaran	116
 BAB III PENUTUP		
III.1	Ringkasan Capaian	130
III.2	Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	133

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
4. Rencana Aksi Tahun 2025;
5. Revisi Rencana Aksi Tahun 2025;
6. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;
7. Lain-lain yang dianggap perlu.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Sumber Daya Manusia BPTD Kelas II Jambi	6
Tabel I.2.	Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025.....	16
Tabel I.3.	Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025	19
Tabel I.4.	Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025	22
Tabel II.1.	Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Triwulan II Tahun 2025.....	29
Tabel II.2.	Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	34
Tabel II.3.	Target dan realisasi Kinerja Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	38
Tabel II.4.	Target dan realisasi Kinerja Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	41
Tabel II.5.	Target dan realisasi Kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	44
Tabel II.6.	Target dan realisasi Kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	48
Tabel II.7.	Target dan realisasi Kinerja Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	51
Tabel II.8.	Target dan realisasi Kinerja Penyusunan dokumen terkait tugas dan fungsi Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	54
Tabel II.9.	Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	58
Tabel II.10.	Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	60
Tabel II.11.	Target dan Realisasi Kinerja Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	63
Tabel II.12.	Target dan Realisasi Kinerja Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	66
Tabel II.13.	Target dan Realisasi Kinerja Pengawasan Evaluasi Pengadaan Pemeliharaan Jalan Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	69

Tabel II.14.	Target dan Realisasi Kinerja Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	72
Tabel II.15.	Target dan Realisasi Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	76
Tabel II.16	Target dan Realisasi Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	79
Tabel II.17	Target dan Realisasi Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	82
Tabel II.18	Target dan Realisasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	86
Tabel II.19	Target dan Realisasi Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	89
Tabel II.20	Tabel dan Realisasi Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemenhub Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	91
Tabel II.21	Target dan Realisasi Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	94
Tabel II.22	Target dan Realisasi Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	97
Tabel II.23	Target dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	100
Tabel II.24	Target dan Realisasi Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	103
Tabel II.25	Target dan Realisasi Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	106
Tabel II.26	Target dan Realisasi Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	109
Tabel II.27	Target dan Realisasi Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	112
Tabel II.28	Target dan Realisasi Kegiatan Mendukung Pembangunan ZI Tahun 2025	115
Tabel II.29.	Rincian per Sumber Dana Triwulan II Tahun 2025.....	117
Tabel II.30.	Rincian per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025.....	117
Tabel II.31.	Rincian Revisi per Sumber Dana Tahun 2025.....	119
Tabel II.32.	Rincian Revisi per Jenis Belanja Tahun 2025	120

Tabel II.33.	Rincian Realokasi per Sumber Dana dan per Jenis Belanja Tahun 2025 ...	120
Tabel II.34.	Rincian Realokasi per Sasaran Program dan per Kegiatan Tahun 2025.....	121
Tabel II.35.	Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2025	124
Tabel II.36.	Rincian Realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025	125
Tabel II.37.	Rincian Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025	126
Tabel II.38.	Rincian Realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2025	127
Tabel II.39.	Anggaran Kegiatan yang terkena <i>Blokir</i> 2025	127
Tabel II.40.	Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan	128
Tabel II.41.	Rincian Penggunaan Sumber Daya Manusia Tahun 2025	130
Tabel III.1.	Tabel Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Grafik Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	33
Gambar II.2	Grafik Capaian IKK Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	37
Gambar II.3	Grafik Capaian IKK Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	40
Gambar II.4	Grafik Capaian IKK Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	44
Gambar II.5	Grafik Capaian IKK Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	47
Gambar II.6	Grafik Capaian IKK Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	51
Gambar II.7	Grafik Capaian IKK Penyusunan dokumen terkait tugas dan fungsi Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	54
Gambar II.8	Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	57
Gambar II.9	Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	60
Gambar II.10	Grafik Capaian IKK Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	63
Gambar II.11	Grafik Capaian IKK Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	66
Gambar II.12	Grafik Capaian IKK Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	69
Gambar II.13	Grafik Capaian IKK Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	72
Gambar II.14	Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	76
Gambar II.15	Grafik Capaian IKK Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	79
Gambar II.16	Grafik Capaian IKK Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman Tahun 2025	82
Gambar II.17	Grafik Capaian IKK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025.....	85

Gambar II.18	Grafik Capaian IKK Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025	88
Gambar II.19	Grafik Capaian IKK Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan Tahun 2025.....	91
Gambar II.20	Grafik Capaian IKK Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025	94
Gambar II.21	Grafik Capaian IKK Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Tahun 2025	97
Gambar II.22	Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025.....	100
Gambar II.23	Grafik Capaian IKK Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025...	103
Gambar II.24	Grafik Capaian IKK Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) Tahun 2025.....	106
Gambar II.25	Grafik Capaian IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025	109
Gambar II.26	Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Tahun 2025	112
Gambar II.27	Grafik Capaian IKK Kegiatan mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025	114

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
4. Rencana Aksi Tahun 2025;
5. Revisi Rencana Aksi Tahun 2025;
6. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;
7. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), maka diperlukan akuntabilitas publik sebagai pedoman penyelenggaraannya. Akuntabilitas ini merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap Instansi Pemerintah yang dalam hal ini sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing masing instansi pemerintah tersebut kepada masyarakat. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib membuat Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025.

I.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Pengelola Transportasi Darat atau disingkat BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor RI Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas :

Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan Pelabuhan Sungai, Danau, Penyeberangan, Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Sarana, Prasarana, Lalu lintas dan angkutan, serta Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan Pelabuhan Sungai, Danau, Penyeberangan;
3. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
5. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, serta bantuan

teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

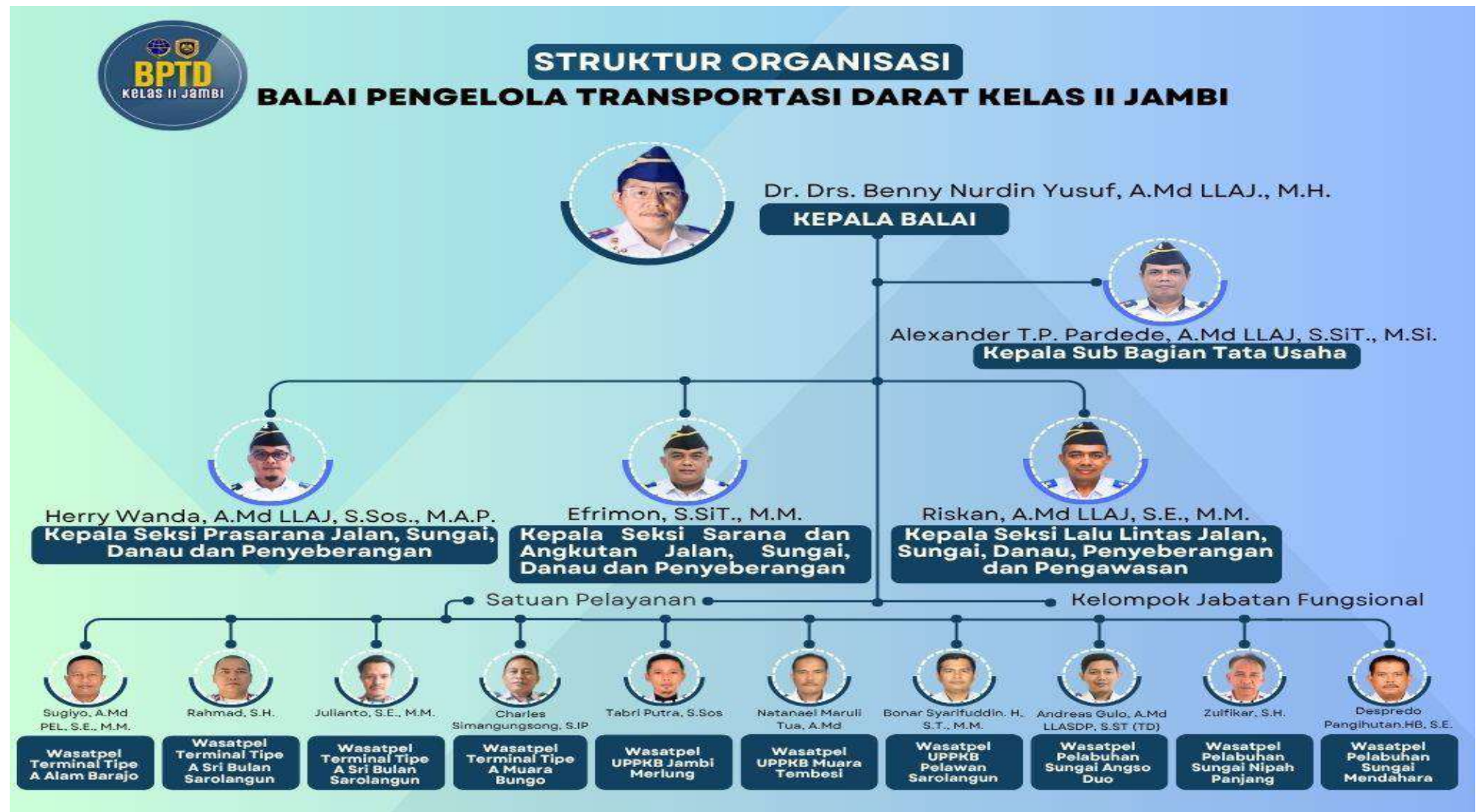
4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam Pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, Pelabuhan dan penyelenggara Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam Pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.1. Bagan Struktur Organisasi



I.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai di BPTD Kelas II Jambi adalah sebesar 307 orang dengan rincian 165 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 88 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 54 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :

Tabel I. 1 Sumber Daya Manusia Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II

NO	UNIT KERJA	JUMLAH			TOTAL
		PNS	PPPK	PPNPN	
1	KANTOR INDUK BPTD KELAS II JAMBI	56	15	8	79
2	TERMINAL TIPE A ALAM BARAJO KOTA JAMBI	26	17	6	49
3	TERMINAL TIPE A SRI BULAN KAB. SAROLANGUN	8	9	3	20
4	TERMINAL TIPE A PULAU TUJUH BANGKO KAB. MERANGIN	11	4	9	24
5	TERMINAL TIPE A MUARA BUNGO KAB. MUARA BUNGO	14	4	11	29
6	UPPKB JAMBI MERLUNG	11	18	6	35
7	UPPKB MUARA TEMBESI	15	10	5	30
8	UPPKB SAROLANGUN	14	11	5	30
9	UPPKB SUNGAI PENUH	-	-	1	1
10	PELABUHAN SUNGAI PS. ANGSO DUO	5	-	-	-
11	PELABUHAN SUNGAI NIPAH PANJANG	2	-	-	-
12	PELABUHAN SUNGAI MENDAHARA	3	-	-	3
JUMLAH		165	88	54	307

I.4. POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN**1. Kewenangan****a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan**

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat petunjuk teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

c. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah pusat yaitu penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung pembangunan prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

2. Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah:

- a. Pengoperasian Terminal Penumpang dan UPPKB;
- b. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
- c. Penataan dan Pembinaan SDM Transportasi Darat;
- d. Perubahan *mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
- e. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
- f. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025 adalah:

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Indikator Kinerja Kegiatan;
- d. Pengukuran Kinerja;
- e. Evaluasi Kinerja.

I.5. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan III ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

I.2.1 Bagan Struktur Organisasi

I.3 Sumber Daya Manusia

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.5 Sistematika Laporan

I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

I.7. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

II.3.1. SK.2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK

1 IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.2. SK.7 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan

1. IKK 7.1 Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

2. IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

3. IKK 7.3 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

4. IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

5. IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

6. IKK 7.7 Penyusunan Dokumen Terkait TUSI

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.3. SK. 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang

1. IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 2. IKK 9.a Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 3. IKK 9.b Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 4. IKK 9.c Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5. IKK 9.d Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 6. IKK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.4. SK. 10 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety

- 1. IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

- 2. IKK 10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.5. SK. 12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan

- 1. IKK 12.2 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.5. IKP4. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub

- 1. IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

- 2. IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat

- a.1) Definisi Indikator Kinerja

- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 3. IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 4. IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5. IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 6. IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 7. IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

8. IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

9. IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

10. IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

11. IKK 4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025

- 1. Pagu Anggaran
 - a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
 - b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- 2. Refocusing Anggaran Tahun 2025
 - a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025

- b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
- 3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 - 2025
- II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025
 - 1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
 - 2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - 3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025
 - 4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja
- II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan
 - 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)
 - 3. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

- III.1 Penutup
 - III.1.1 Ringkasan Capaian
- III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

- 1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025;
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- 3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- 4. Rencana Aksi Tahun 2025;
- 5. Revisi Rencana Aksi Tahun 2025;
- 6. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;
- 7. Lain-lain yang dianggap perlu.

I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025 – 2029 masih dalam proses penyusunan dikarenakan masih menunggu penyelesaian Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang masih dalam tahap proses.

I.6.1 Uraian / Narasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja Tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025 terdiri atas Indikator Kinerja Kegiatan guna mencapai sasaran dengan target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel I.2 Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi
Tahun 2025

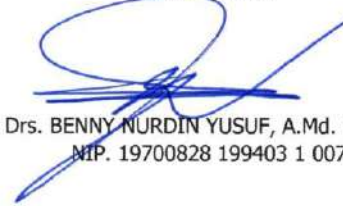
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2.	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	88
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	57
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.800
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4.	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Jambi, 1 Desember 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Indikator kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran sebesar Rp. 78.407.073.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I.3 Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Jambi Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat



AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Jambi, 6 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

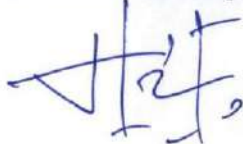
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	88
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	57
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.800
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 10.429.810.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 11.468.791.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 22.167.935.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.067.251.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 242.000.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.254.393.000
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 23.776.893.000

Pihak Kedua

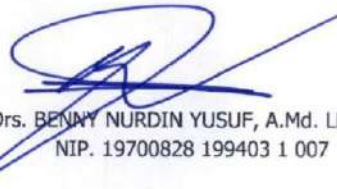
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat



AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Jambi, 6 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi


Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

I.8. Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada bulan Juni Tahun 2025 dilakukan Revisi I Perjanjian Kinerja kepala BPTD Kelas II Jambi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan adanya perubahan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran sebesar Rp. 78.407.073.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I.4 Revisi I Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.
 Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi
 Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.
 Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

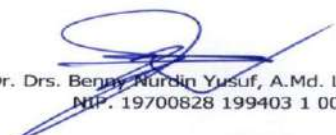
Jambi, 16 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK 2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	9
2.	SK 7 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.1 Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1
		IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	4
		IKK 7.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi	3
		IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Tahun	1
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	3
		IKK 7.7 Penyusunan Dokumen Terkait TUSI	Kegiatan	2
3.	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	4
		IKK 9.a Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	2
		IKK 9.b Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	2
		IKK 9.c Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	2
		IKK 9.d Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	2
		IKK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	3

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK 2 Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	9
2.	SK 7 Meningkatkan pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.1 Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1
		IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	4
		IKK 7.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi	3
		IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Tahun	1
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	3
		IKK 7.7 Penyusunan Dokumen Terkait TUSI	Kegiatan	2
3.	SK 9 Meningkatkan Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	4
		IKK 9.a Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	2
		IKK 9.b Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	2
		IKK 9.c Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	2
		IKK 9.d Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	2
		IKK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	3

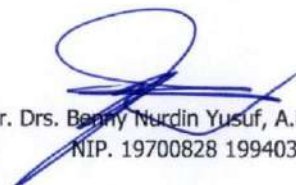
KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 10.429.810.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 11.468.791.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 22.167.935.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.067.251.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 242.000.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.254.393.000
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 23.776.893.000

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat


 Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.
 NIP. 19670131 202521 1 001

Jambi, 16 Juni 2025
 Pihak Pertama
 Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
 Kelas II Jambi


 Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.
 NIP. 19700828 199403 1 007



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

II.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Mekanisme pengelolaan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melalui aplikasi *E-performance* dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi *E-performance* yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan.

II.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *E-Performance* yang menyediakan fasilitas Inputing, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya

dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025;

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja BPTD Kelas II Jambi, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan. Bermuara pada terwujudnya 6 (enam) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode Tahun Anggaran 2025.

Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja BPTD Kelas II Jambi Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK 2.	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK					0%			100%			100%
IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	9	9	0	0%	9	9	100%	9	9	100%
SK 7.	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan					33%			50%			56%
IKK 7.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
IKK 7.2	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	4	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
IKK 7.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi	3	3	0	0%	3	0	0%	3	1	33%
IKK 7.4	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Tahun	1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
IKK 7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	3	3	0	0%	3	3	100%	3	3	100%
IKK 7.7	Penyusunan Dokumen Terkait TUSI	Kegiatan	2	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%
SK 9.	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang					33%			42%			50%
IKK 9.1	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	4	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
IKK 9.a	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	2	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%
IKK 9.b	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	2	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%
IKK 9.c	Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	2	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK 2.	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK					0%			100%			100%
IKK 9.d	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	2	2	0	0%	2	1	50%	2	2	100%
IKK 9.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	3	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
SK 10.	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety					13%			63%			106%
IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	72	72	18	25%	72	45	62,5%	72	76	106%
IKK 10.2	Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	8	8	0	0%	8	0	0%	8	3	38%
SK 12.	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan					0%			76%			102%
IKK 12.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	200	200	0	0%	200	151	76%	200	203	102%
IKP 4.	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub					71%			85%			97%
IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	1	33%	3	1	33%	3	2	67%
IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
IKK 4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan	2	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
IKK 4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK 2.	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK					0%			100%			100%
IKK 4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	1	0	0%	1	0	0%	1	1	100%
IKK 4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
IKK 4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
IKK 4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
IKK 4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	2	2	0	0%	2	2	100%	2	2	100%
IKK 4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2	2	1	50%	2	2	100%	2	2	100%
IKK 4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						25%			69,3%			85,2%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						44,7%			63,8%			75,8%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)						11			15			19
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)						16			12			8

Selama tahun 2025 sampai dengan Triwulan III, ada 6 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 27 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

2.3.1 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan dan dilaksanakan memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan.

1. IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan perintis di jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.

Penyelenggaraan angkutan jalan perintis dilaksanakan berdasarkan jaringan trayek angkutan orang yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Capaian kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan dihitung berdasarkan jumlah trayek angkutan perintis yang dilayani.

Keterangan:

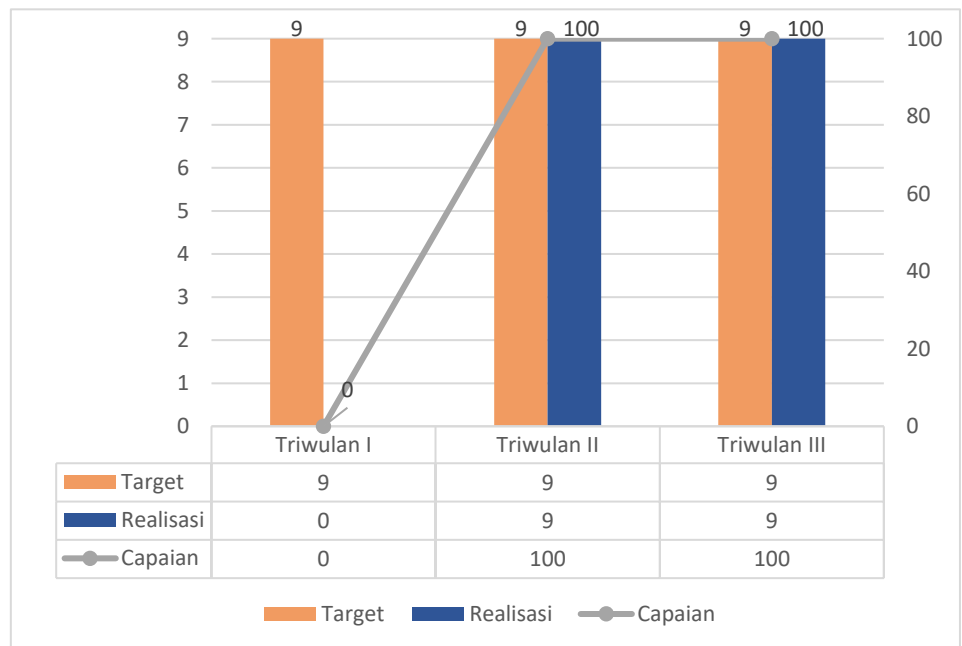
Trayek yang dilayani adalah:

1. Desa Sungai Jernih – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
2. Desa Belukar Panjang – Terminal Tipe A Muara Bungo;
3. Desa Sari Mulya – Terminal Tipe A Muara Bungo;
4. Desa Pemayung – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;

5. Desa Mekar Jaya – Terminal Muara Bulian – Terminal Alam Barajo Jambi.
6. Desa Suo-Suo – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
7. Kelurahan Mendahara Ilir (Kantor Camat Mendahara) – Pasar Kamis (Kel. Parit Culum I);
8. Kelurahan Simpang (Kantor Camat Berbak) – Pasar Kamis (Kel. Parit Culum I);
9. Desa Panca Karya – Terminal Sribulan Sarolangun.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025 sebesar 9 Trayek, jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 9 Trayek, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini:



Gambar II.1 Grafik Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian realisasi setiap Triwulan untuk Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025.

Tabel II.2 Tabel Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	9	9	9
2.	Realisasi	0	9	9
3.	Capaian	0%	100%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
4. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 8317 Tahun 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025;

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan memiliki target 9 Trayek.

c. Faktor-faktor keberhasilan:

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan sebagai berikut :

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan;
2. Adanya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan perintis;

3. Kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait usulan trayek, pengawasan dan pelaporan;
4. Perencanaan yang matang dalam menentukan trayek yang akan dilayani oleh angkutan perintis tersebut;
5. Minat masyarakat yang tinggi terhadap angkutan perintis tersebut.

d. Faktor-faktor kegagalan atau potensi kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan sebagai berikut :

1. Kegiatan tersebut masih menunggu terkait efisiensi anggaran;
2. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan;
3. Load factor yang rendah;
4. Sebagian besar akses jalan menuju daerah yang dijangkau oleh angkutan perintis ini masih rusak dan sulit ditempuh;
5. Faktor cuaca maupun kondisi geografis dari daerah yang dijangkau angkutan perintis.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan pada Tahun 2025 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$IKK2.1 = \frac{\text{Jumlah Trayek realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Trayek yang direncanakan}} \times 100\%$$

Keterangan:

Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan pada Tahun 2025 mencapai 9 Trayek.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 2.603.900.000. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 1.530.787.478,- atau mencapai 58,79% dengan nomenklatur pada POK yaitu Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional), Kode Anggaran: 4637.QAH.001.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute / trayek angkutan perintis di Provinsi Jambi dengan memperhatikan RPJMN, Renstra, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis di lapangan;
2. Komitmen antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum;
3. Dapat terus Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dalam pelayanan jasa angkutan umum;
4. Meningkatkan kualitas layanan dari moda angkutan darat;
5. Dapat terus Mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang handal;
6. Selalu Menciptakan rasa nyaman dan efisiensi terhadap pengguna jasa angkutan umum;
7. Dapat Mewujudkan konektivitas transportasi darat.

2.3.2 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 7 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 7.1 Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM;
2. IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM;
3. IKK 7.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM;
4. IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM;
5. IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok;
6. IKK 7.7 Penyusunan Dokumen Terkait TUSI.

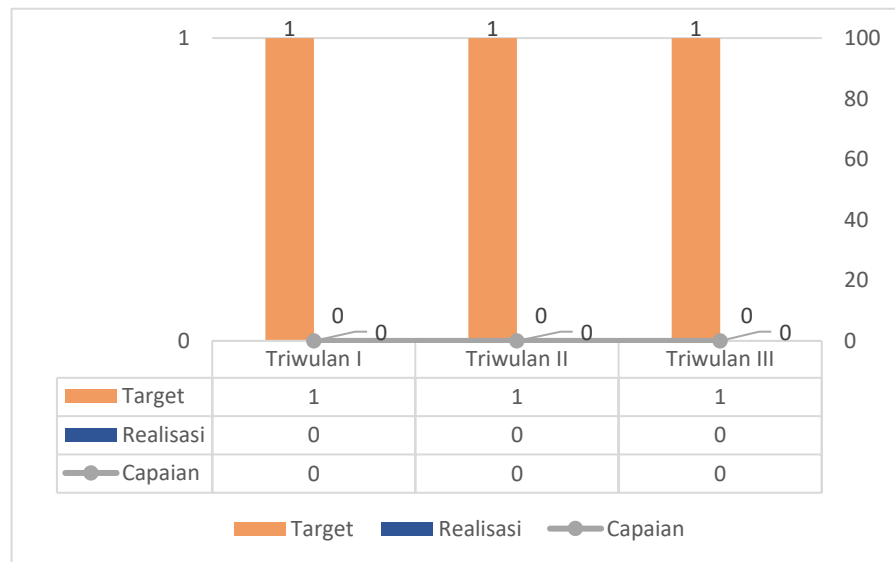
1. IKK 7.1 Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Jumlah terminal penumpang angkutan jalan tipe A yang telah dilakukan peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan layanan agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada Tahun 2025 Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM adalah kegiatan melaksanakan Revitalisasi Terminal Tipe A Alam Barajo.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pelaksanaan Kegiatan Indikator Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM merupakan kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe A Alam Barajo, tahap pelaksanaan fisik kegiatan telah mencapai 73,09% jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 Unit, maka capaian kinerja belum mencapai target yaitu 0 Unit. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.2 Grafik Capaian IKK Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini rincian realisasi setiap Triwulan untuk Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025.

Tabel II.3 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	1	1	1
2.	Realisasi	0	0	0
3.	Capaian	0%	0%	0%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025 Indikator Kinerja Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM memiliki target 1 Unit.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu;
2. Tersedianya anggaran kegiatan;
3. Memiliki sistem dan prosedur yang jelas.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu;

2. Efisiensi anggaran;
3. Lemahnya sistem pengawasan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Kinerja Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM pada Tahun 2025 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$IKK\ 7.2 = \text{Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan Pelayanannya}$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 1.908.893.000. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 1.000.217.392,- atau mencapai 52,40% dengan nomenklatur pada POK yaitu Terminal Penumpang Tipe-A Direhabilitasi (PEN), Kode Anggaran: 4638.CDP.046.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan;
2. Menyediakan fasilitas yang memadai untuk penumpang dengan kebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas Melakukan pengawasan secara optimal terhadap transportasi jalan;
3. Meningkatkan pendapatan PNBPN di Terminal Tipe-A.

2. IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM

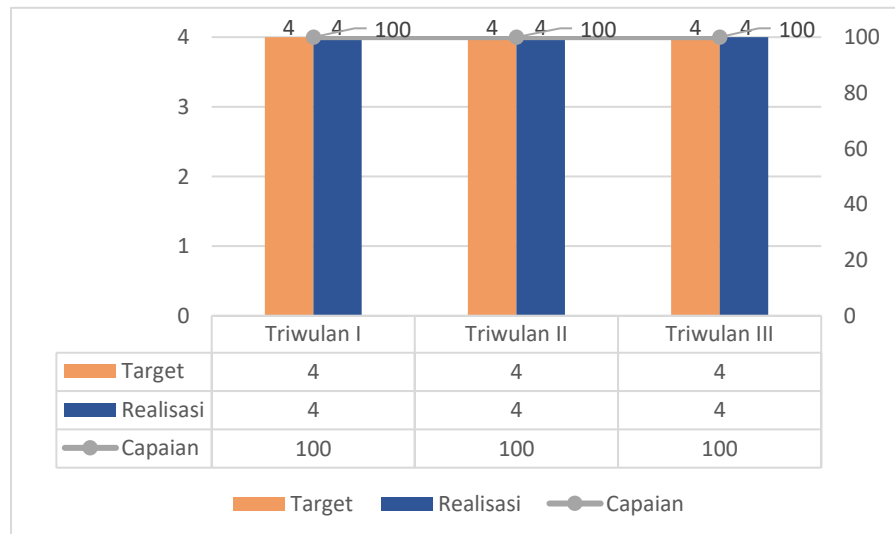
a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Terminal Tipe A yang Beroperasi merupakan Terminal Tipe A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Terminal Tipe A adalah Terminal Tipe A yang dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Terminal Tipe A yang beroperasi pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi ada 4 Terminal yaitu:

1. Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi;
2. Terminal Tipe A Sribulan Sarolangun;
3. Terminal Tipe A Pulau Tujuh Bangko Merangin;
4. Terminal Tipe A Muara Bungo.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM Tahun 2025 sebesar 4 Unit jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 4 Unit, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.3 Grafik Capaian IKK Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini rincian realisasi setiap Triwulan untuk Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM yang beroperasi Tahun 2025.

Tabel II.4 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	4	4	4
2.	Realisasi	4	4	4
3.	Capaian	100%	100%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025 Indikator Kinerja Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM memiliki target 4 Unit. Terminal Tipe A yang beroperasi pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi ada 4 Terminal yaitu:

1. Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi;
2. Terminal Tipe A Sribulan Sarolangun;
3. Terminal Tipe A Pulau Tujuh Bangko Merangin;
4. Terminal Tipe A Muara Bungo.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM sebagai berikut :

1. Tingginya antusias masyarakat menggunakan angkutan umum;
2. Informasi tentang pelayanan diterminal tersampaikan kepada masyarakat;

3. Banyak masyarakat yang menggunakan terminal sebagai tempat perpindahan koridor;

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM sebagai berikut :

1. Kurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum yang telah disediakan;
2. Fasilitas umum di Terminal masih kurang memadai bagi pengguna layanan;
3. Kurang terpenuhi kebutuhan operasional Terminal dikarenakan minimnya anggaran operasional pada Terminal.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Kinerja Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM pada Tahun 2025 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$IKK\ 7.2 = \text{Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM}$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 5.678.510.000. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 3.343.317.829,- atau mencapai 58,88% dengan nomenklatur pada POK yaitu Terminal Penumpang Tipe-A dikelola, Kode Anggaran: 4638.CDP.040.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melaksanakan sosialisasi kepada Organda serta masyarakat pengguna angkutan umum untuk turut serta meramaikan terminal yang sudah ada;
2. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan fasilitas para penumpang;
3. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap transportasi jalan;
4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna fasilitas terminal Tipe-A;
5. Meningkatkan kemampuan pelayanan guna mengantisipasi kebutuhan dimasa yang akan datang;
6. Meningkatkan minat Masyarakat agar lebih banyak menggunakan Transportasi Umum;
7. Meningkatkan pendapatan PNB di Terminal Tipe-A.

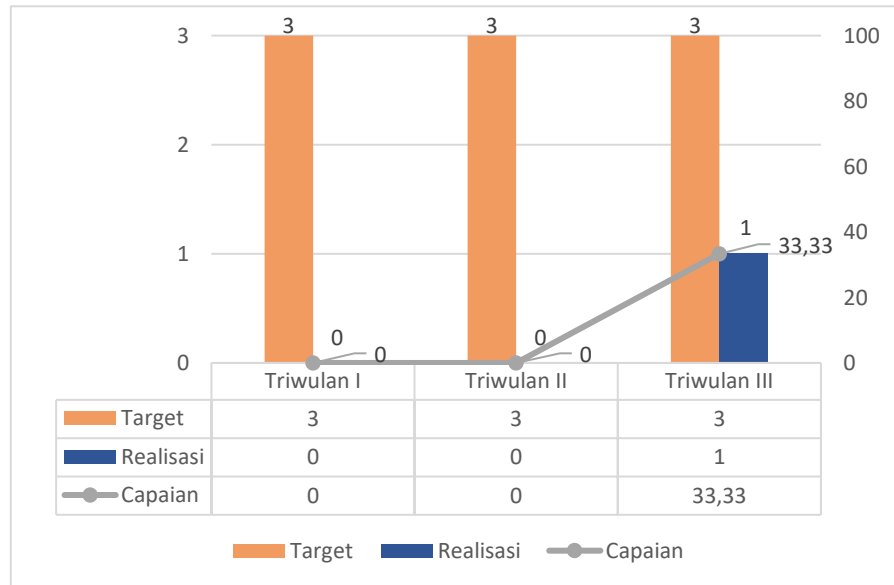
3. IKK 7.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Jumlah unit fasilitas penimbangan kendaraan bermotor yang telah dilakukan peningkatan terhadap sarana, prasarana, sistem, dan kualitas layanan operasionalnya agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah. Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM pada IKK tersebut merupakan kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada 3 Lokasi UPPKB pada BPTD Kelas II Jambi.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025 telah dilaksanakan 1 Lokasi pada UPPKB Jambi Merlung jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3 Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 33,33%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik capaian sebagai berikut:



Gambar II.4 Grafik Capaian IKK Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanan nya untuk memenuhi SPM Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan untuk Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanan nya untuk memenuhi SPM yang beroperasi Tahun 2025.

Tabel II.5 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanan nya untuk memenuhi SPM Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	3	3	3
2.	Realisasi	0	0	1
3.	Capaian	0%	0%	33,33%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanan nya untuk memenuhi SPM terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;

2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanan nya untuk memenuhi SPM memiliki target 3 Lokasi, yaitu:

1. UPPKB Muara Tembesi (Beroperasi);
2. UPPKB Jambi Merlung (Beroperasi);
3. UPPKB Pelawan Sarolangun (Beroperasi);

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanan nya untuk memenuhi SPM sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja UPPKB dan melakukan perbaikan berdasarkan temuan evaluasi akan membantu meningkatkan efektivitas pengawasan;
2. Infrastruktur yang memadai;
3. Penegakkan hukum yang konsisten;
4. Tersedianya anggaran kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanan nya untuk memenuhi SPM sebagai berikut :

1. Kerusakan Infrastruktur;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana di UPPKB, seperti alat timbang yang tidak akurat atau tidak berfungsi dengan baik, juga dapat menghambat efektivitas
3. Tidak Tersedianya anggaran kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM pada Tahun 2025 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$IKK\ 7.3 = \text{Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan s.d tahun (n)}$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{3} \times 100\% = 33,33\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 435.819.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 229.510.000,- atau mencapai 52,66% dengan nomenklatur pada POK yaitu Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Kode Anggaran: 4639.CDP.077. (523111)

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Menyiapkan fasilitas yang memadai bagi pengemudi dan petugas, seperti area istirahat, toilet, dan fasilitas informasi;
2. Menerapkan teknologi terkini dalam proses penimbangan, seperti sistem penimbangan otomatis dan pemantauan jarak jauh;
3. Membangun sistem monitoring yang efektif untuk memantau kinerja UPPKB dan mendeteksi penyimpangan.

4. IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM**a.1) Definisi Indikator Kinerja**

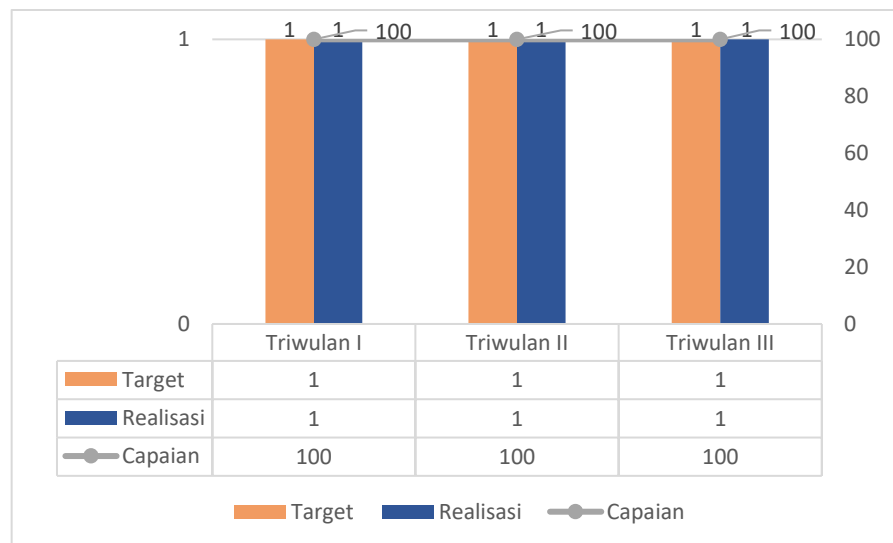
UPPKB adalah Unit di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap muatan kendaraan bermotor, khususnya terkait berat kendaraan dan muatannya, untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan mencegah kerusakan infrastruktur jalan.

IKK Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM memiliki target 1 Tahun. Adapun Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM, yaitu:

1. UPPKB Muara Tembesi (Beroperasi);
2. UPPKB Jambi Merlung (Beroperasi);
3. UPPKB Pelawan Sarolangun (Beroperasi);
4. UPPKB Sungai Penuh (Tidak Beroperasi/Jaga Aset).

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM Tahun 2025 telah memiliki realisasi 1 Tahun jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 Tahun, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik capaian sebagai berikut:



Gambar II.5 Grafik Capaian IKK Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan untuk Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM yang beroperasi Tahun 2025.

Tabel II.6 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanan nya untuk memenuhi SPM Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	1	1	1
2.	Realisasi	1	1	1
3.	Capaian	100%	100%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanan nya untuk memenuhi SPM terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM memiliki target 1 Tahun dengan pelaksanaan pada UPPKB sebagai berikut, yaitu:

1. UPPKB Muara Tembesi (Beroperasi);
2. UPPKB Jambi Merlung (Beroperasi);
3. UPPKB Pelawan Sarolangun (Beroperasi);
4. UPPKB Sungai Penuh (Tidak Beroperasi/Jaga Aset);

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan Keandalan Sarana & Prasarana;
2. Dukungan Teknologi Informasi;
3. Petugas penimbang yang memahami standar operasional prosedur (SOP).

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM sebagai berikut :

1. Alat Penimbangan Tidak Akurat / Rusak;
2. Kurangnya SDM atau Petugas Tidak Kompeten
3. Sistem Manual, Tidak Terintegrasi.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Kinerja Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM pada Tahun 2025 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$IKK \ 7.4 = \frac{\text{Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM}}{\text{Target}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 4.288.289.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 2.969.949.666,- atau mencapai 69,26% dengan nomenklatur pada POK yaitu Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola, Kode Anggaran: 4639.CDP.077.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Modernisasi Peralatan dan Infrastruktur;
2. Digitalisasi dan Integrasi Sistem;
3. Pelatihan berkala untuk petugas tentang teknis penimbangan, peraturan, dan etika pelayanan publik.

5. IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok**a.1) Definisi Indikator Kinerja**

Monitoring adalah proses pengamatan, pencatatan, dan pelaporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas, program, atau kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, standar operasional, dan target yang ditetapkan. Adapun tujuan dari kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok, yaitu;

1. Mengetahui apakah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dijalankan dengan baik;
2. Mengukur capaian kinerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan;
3. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.

Adapun pelaksanaan Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok, yaitu:

1. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana;
2. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas;
3. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Tahun 2025 telah memiliki realisasi 3 Kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik capaian sebagai



Gambar II.6 Grafik Capaian IKK Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan untuk Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Tahun 2025.

Tabel II.7 Target dan Realisasi Kinerja Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	3	3	3
2.	Realisasi	0	3	3
3.	Capaian	0%	100%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penilaian Pelayanan Kinerja pada Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok memiliki target 3 Kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana;
2. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas;
3. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok sebagai berikut :

1. Kejelasan Tujuan dan Indikator Kinerja;
2. Keterlibatan pihak terkait (Stakeholder);
3. Sistem Pelaporan dan Monitoring yang Efisien.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok sebagai berikut :

1. Data tidak akurat, tidak lengkap atau tidak tersedia;
2. Tanpa Standar Operasional Prosedur (SOP), kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara tidak konsisten dan tidak professional;
3. Rekomendasi hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh manajemen atau unit kerja terkait.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Kinerja Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok pada Tahun 2025 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$IKK\ 7.5 = \text{Jumlah Pelaksanaan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok}$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 55.074.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 55.073.500,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur pada POK yaitu Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Kode Anggaran: 4640.FAE.923.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Penguatan SOP dan Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;
2. Peningkatan Keterlibatan Stakeholder;
3. Tindak lanjut rekomendasi secara nyata.

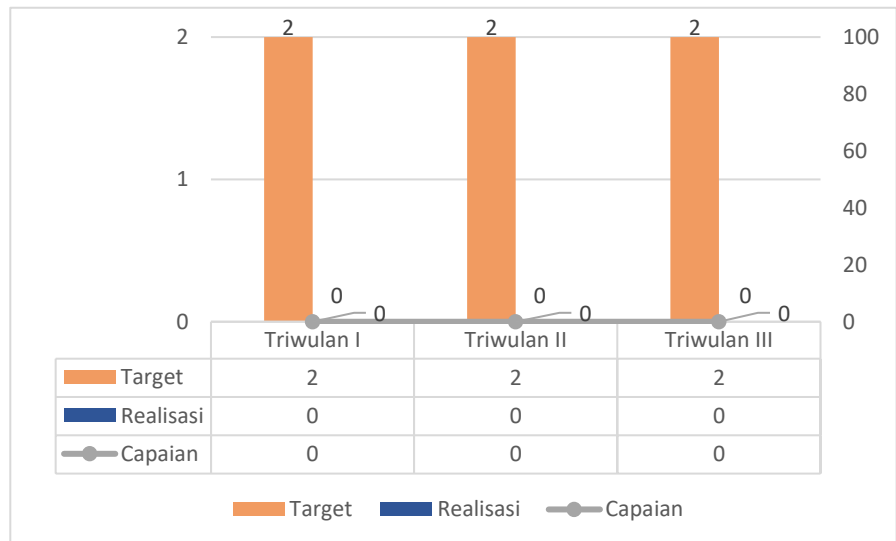
6. IKK 7.7 Penyusunan Dokumen Terkait TUSI**a.1) Definisi Indikator Kinerja**

Penyusunan dokumen terkait tugas dan fungsi adalah proses sistematis dalam merumuskan, merorganisir, dan mendokumentasikan informasi atau pedoman kerja yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) suatu unit, jabatan atau instansi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan organisasi. Adapun pelaksanaan kegiatan pada indikator tersebut, yaitu:

1. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Revitalisasi Terminal Tipe A Alam Barajo;
2. Penyusunan Dokumen Andalalin.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Penyusunan dokumen terkait tugas dan fungsi Tahun 2025 masih tahap pelaksanaan audiensi jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 2 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik capaian sebagai



Gambar II.7 Grafik Capaian IKK Penyusunan dokumen terkait tugas dan fungsi Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan untuk Penyusunan dokumen terkait tugas dan fungsi Tahun 2025.

Tabel II.8 Target dan Realisasi Kinerja Penyusunan dokumen terkait tugas dan fungsi Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	2	2	2
2.	Realisasi	0	0	0
3.	Capaian	0%	0%	0%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Penyusunan dokumen terkait tugas dan fungsi terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Penyusunan dokumen terkait tugas dan fungsi memiliki target 2 Kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Revitalisasi Terminal Tipe A Alam Barajo;
2. Penyusunan Dokumen Andalalin.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Penyusunan dokumen terkait tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kompetensi penyusun dokumen;
2. Adanya panduan atau SOP Penyusunan dokumen;
3. Ketepatan Identifikasi Dampak Lalu Lintas;
4. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan yang jelas.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Penyusunan dokumen terkait tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tidak sesuai regulasi yang berlaku;
2. Tidak ada kajian mitigasi yang realistis;
3. Identifikasi dampak tidak spesifik.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Kinerja Penyusunan dokumen terkait tugas dan fungsi pada Tahun 2025 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$IKK\ 7.7 = \text{Jumlah Penyusunan Dokumen Terkait Tugas dan Fungsi}$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja Penyusunan dokumen terkait tugas dan fungsi sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{2} \times 100\% = 0\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Penyusunan dokumen terkait tugas dan fungsi pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 198.500.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0% dengan nomenklatur pada POK yaitu Terminal Tipe A Direhabilitasi (PEN) item Kegiatan Penyusunan Dokumen UKL-UPL Revitalisasi Terminal Tipe A Alam Barajo dan Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Tipe A Alam Barajo, Kode Anggaran: 4638.CDP.046.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Peningkatan kompetensi Tim Penyusun;
2. Pengumpulan data lapangan yang akurat dan komprehensif;
3. Koordinasi dan konsultasi Intensif dengan Instansi terkait.

2.3.3 Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang

Pencapaian Sasaran Kegiatan 9 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata;
2. IKK 9.a Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri;
3. IKK 9.b Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin;
4. IKK 9.c Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan;
5. IKK 9.d Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
6. IKK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan.

1. IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata**a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan**

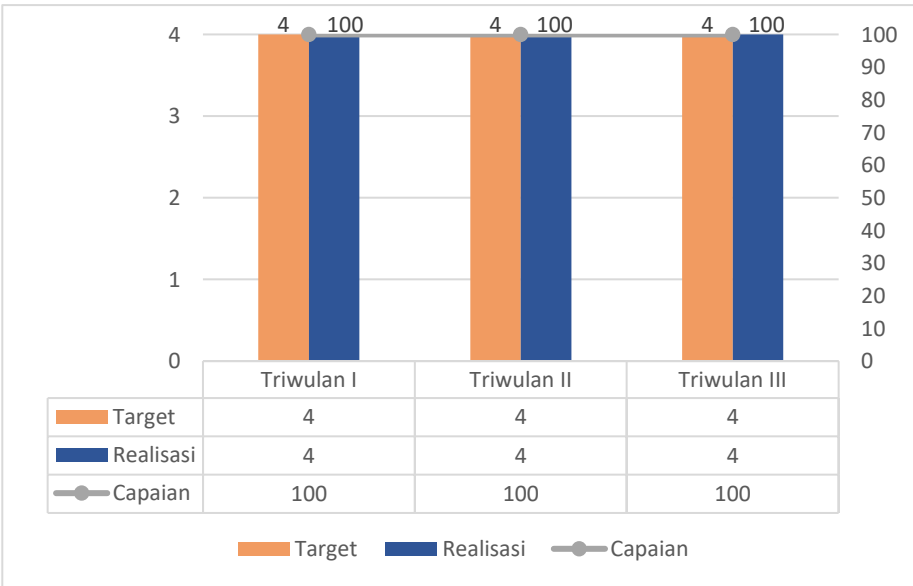
Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata adalah kegiatan untuk memastikan bahwa pelayanan angkutan umum antar kota, antar jemput dan pariwisata berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan

menjaga keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan ketertiban dalam pelayanan transportasi umum. Pelaksanaan kegiatan Ramp Check AKAP, AJAP dan Pariwisata dilaksanakan pada Terminal berikut:

- 1. Ramp Check AKAP, AJAP, dan Pariwisata di Terminal Alam Barajo;
- 2. Ramp Check AKAP, AJAP, dan Pariwisata di Terminal Sri Bulan Sarolangun;
- 3. Ramp Check AKAP, AJAP, dan Pariwisata di Terminal Bangko;
- 4. Ramp Check AKAP, AJAP, dan Pariwisata di Terminal Muara Bungo.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Tahun 2025 sebesar 4 Kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 4 Kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.8 Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini rincian capaian setiap Triwulan untuk Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Tahun 2025.

Tabel II.9 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	4	4	4
2.	Realisasi	4	4	4
3.	Capaian	100	100	100

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata memiliki target sebesar 4 Kegiatan.

c. Faktor-faktor Keberhasilan:

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase Jumlah operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan kesiapan SDM yang kompeten;
2. Peralatan dan fasilitas pemeriksaan yang memadai;
3. Koordinasi antar Instansi;
4. Sosialisasi dan komunikasi kepada Operator Angkutan
5. Dukungan regulasi dan penegakkan hukum.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata sebagai berikut :

1. Kurangnya kompetensi dan profesionalisme Petugas;
2. Minimnya peralatan dan fasilitas pemeriksaan;
3. Kurangnya koordinasi antar Instansi;
4. Tidak konsisten dan hanya bersifat seremonial;
5. Rendahnya kesadaran operator dan pengemudi.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi capaian Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata pada Tahun 2025 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$IKK\ 9.1 = \frac{\text{Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata}}{\text{Target}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 8.000.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur pada POK yaitu Monitoring Pengendalian Lalu Lintas Kode Anggaran: FAE.923.0F

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Peningkatan kompetensi dan kapasitas Petugas;
2. Penyediaan alat dan fasilitas pemeriksaan yang memadai;
3. Penguatan sistem koordinasi lintas instansi;
4. Peningkatan sosialisasi dan edukasi ke Operator Angkutan.

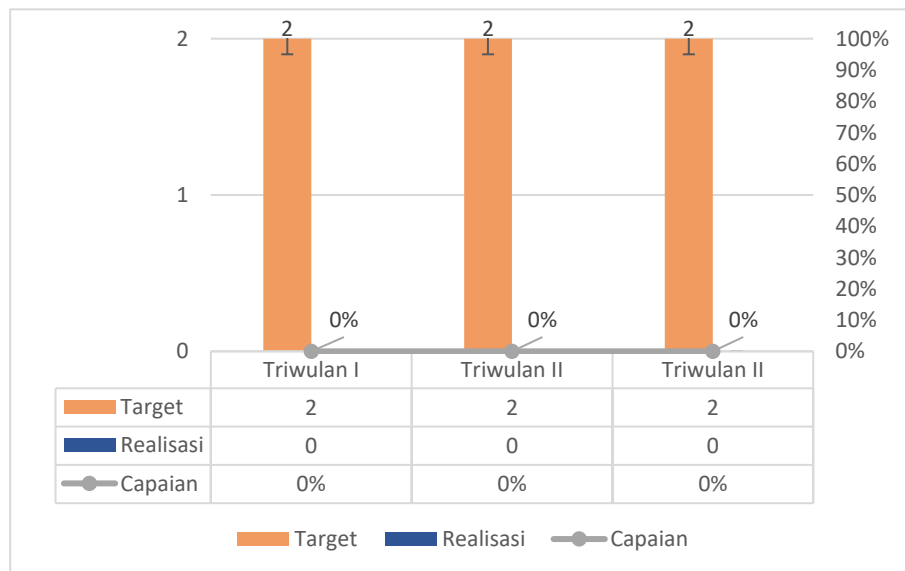
2. IKK 9.a Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri adalah pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa proses pembuatan, perakitan dan/atau modifikasi bodi kendaraan bermotor oleh bengkel karoseri dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis dan regulasi yang berlaku.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri Tahun 2025 belum memiliki realisasi jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 2 Kegiatan maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.9 Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini rincian capaian setiap Triwulan untuk Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri Tahun 2025.

Tabel II.10 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	2	2	2
2.	Realisasi	0	0	0
3.	Capaian	0%	0%	0%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
4. Keputusan Dirjen Hubdat Nomor SK.3211/AJ.410/DRJD/2018 tentang Tata Cara Penunjukan Bengkel Karoseri dan Penerbitan Sertifikat Uji Tipe.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri memiliki target sebesar 2 Kegiatan.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri sebagai berikut :

1. Ketersediaan SDM Pengawas yang kompeten;
2. Peralatan dan fasilitas pendukung pengawasan;
3. Legalitas dan kepatuhan bengkel karoseri;
4. Koordinasi dan sinergi antar Instansi.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri sebagai berikut :

1. Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM Pengawas;
2. Tidak tersedianya alat dan fasilitas pendukung pengawasan;
3. Minimnya penegakan hukum dan sanksi;
4. Kurangnya pembinaan dan sosialisasi
5. Lemahnya koordinasi antar Instansi.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IKK\ 9.a = \frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri}}{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri}}$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{2} \times 100\% = 0\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 31.970.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 31.970.000,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur pada POK yaitu Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan Kode Anggaran: Kode Anggaran: FAE.923.0G

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan:

1. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Pengawas;
2. Penyediaan peralatan dan sistem pendukung;
3. Peningkatan, pembinaan dan sosialisasi ke bengkel;
4. Penguatan penegakan hukum dan sanksi tegas.

3. IKK 9.b Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin**a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan**

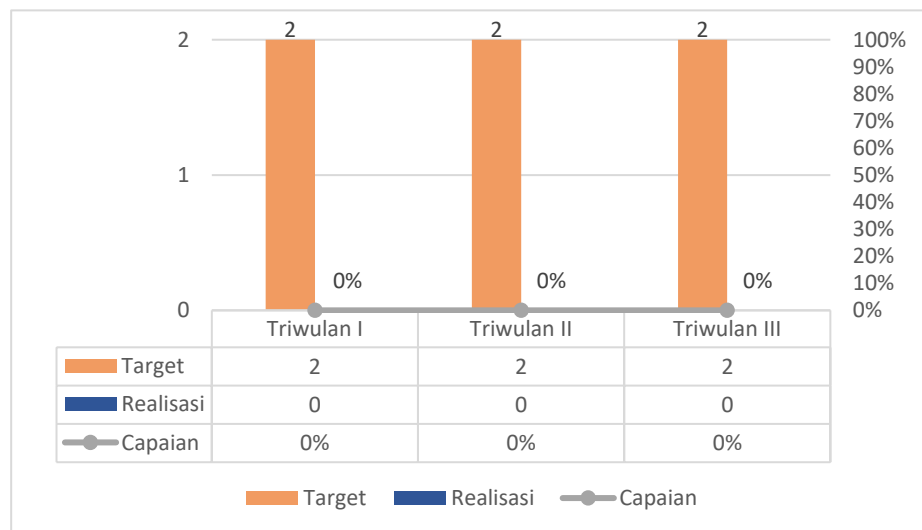
Pengawasan dan evaluasi MRLL adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi berwenang untuk memastikan bahwa rencana dan pelaksanaan manajemen serta rekayasa lalu lintas (seperti pengaturan rambu, marka, APILL, pengaturan arus lalu lintas, dan manajemen simpang) berjalan sesuai standar, efektif, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pengawasan dan evaluasi Andalalin adalah proses untuk memeriksa apakah pemilik atau pengelola bangunan/kawasan yang wajib Andalalin telah:

1. Melaksanakan rekomendasi teknis hasil kajian Andalalin (misalnya pembangunan akses masuk, pelebaran jalan, manajemen parkir).
2. Menjaga agar kegiatan usahanya tidak menimbulkan gangguan lalu lintas terhadap lingkungan sekitarnya.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin Tahun 2025 belum memiliki realisasi jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 2 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.10 Grafik Capaian IKK Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini rincian capaian setiap Triwulan untuk Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin Tahun 2025.

Tabel II.11 Target dan Realisasi Kinerja Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	2	2	2
2.	Realisasi	0	0	0
3.	Capaian	0%	0%	0%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 75 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Analisis Dampak Lalu Lintas;
4. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin memiliki target sebesar 2 Kegiatan.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin sebagai berikut :

1. Ketersediaan SDM Pengawas yang kompeten;
2. Koordinasi dan kolaborasi antar Instansi;
3. Sistem dan prosedur pengawasan yang jelas;
4. Data dan dokumen teknis yang lengkap.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM yang kompeten dan terlatih;
2. Minimnya koordinasi antar Instansi terkait;
3. Tidak adanya SOP atau jadwal evaluasi rutin;
4. Keterbatasan anggaran dan sarana pendukung.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IKK\ 9.b = \frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin}}{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin}} \times 100\% = 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{2} \times 100\% = 0\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur pada POK yaitu Monitoring Pengendalian Lalu Lintas Kode Anggaran: FAE.923.0F

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Penguatan SDM Teknis Pengawas;
2. Penyusunan dan penegakan SOP pengawsan;
3. Digitalisasi dokumen dan sistem informasi;
4. Koordinasi dan Sinergi antar Instansi.

4. IKK 9.c Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan**a.1) Definisi Indikator Kinerja**

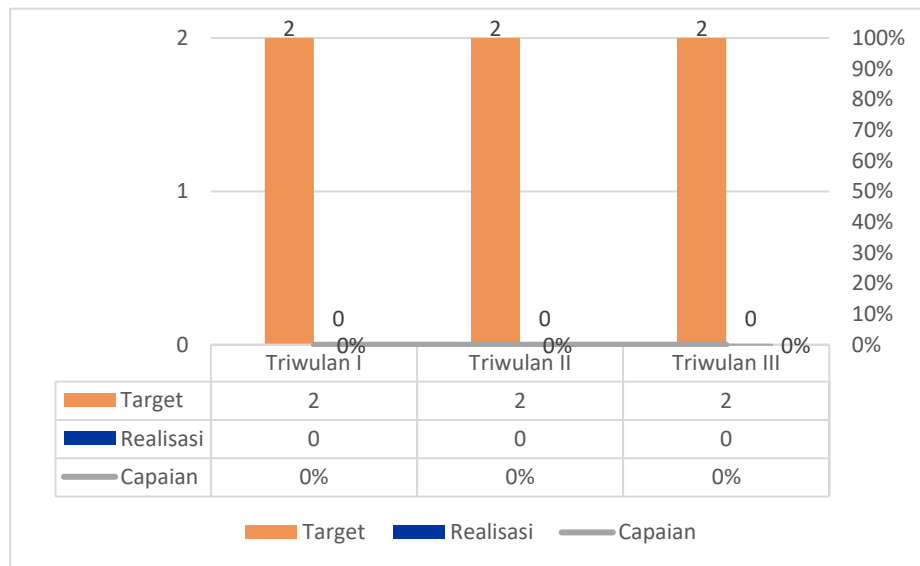
Pengawasan dan evaluasi pengadaan perlengkapan jalan adalah proses pengendalian, pemantauan, dan penilaian terhadap kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan, serta pemeliharaan perlengkapan jalan (seperti rambu lalu lintas, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas/APIII, cermin tikung, dan guardrail) untuk memastikan bahwa:

1. Kualitas dan spesifikasi teknis sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Proses pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Perlengkapan jalan yang dipasang berfungsi efektif dalam mendukung keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025 belum terlaksana jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 2 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.11 Grafik Capaian IKK Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini rincian capaian setiap Triwulan untuk Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025.

Tabel II.12 Target dan Realisasi Kinerja Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	2	2	2
2.	Realisasi	0	0	0
3.	Capaian	0%	0%	0%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan memiliki target sebesar 2 Kegiatan.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan sebagai berikut:

1. Perencanaan teknis yang matang;
2. SDM Pengawas yang kompeten;
3. SOP dan dokumen evaluasi yang jelas;
4. Koordinasi antar bidang/Instansi.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan sebagai berikut:

1. Perencanaan tidak berdasarkan kebutuhan nyata;
2. SDM Pengawas tidak kompeten atau terbatas;
3. Tidak ada SOP dan instrumen evaluasi teknis;
4. Lemahnya koordinasi internal dan antar Instansi.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IKK\ 9.c = \frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan}}{\text{Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan}}$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan realisasi Kinerja Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{2} \times 100\% = 0\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan pada Tahun 2025 diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

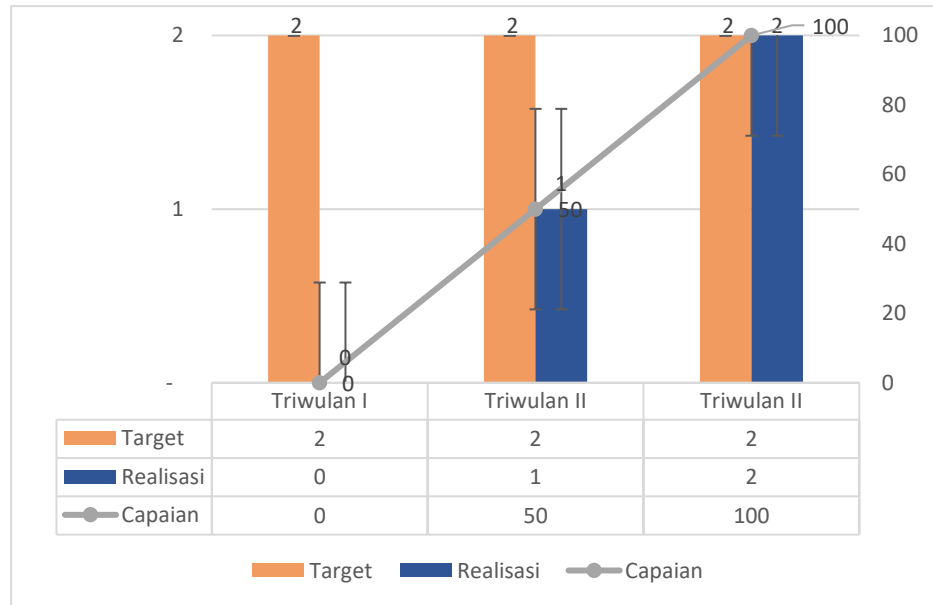
1. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Pengawas;
2. Penyusunan SOP dan standar evaluasi teknis;
3. Pengadaan barang sesuai aturan dan spesifikasi
4. Monitoring dan Evaluasi pasca pemasangan.

5. IKK 9.d Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan**

Pengawasan dan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan adalah serangkaian kegiatan untuk memantau, menilai, dan memastikan bahwa proses pemeliharaan berbagai jenis perlengkapan jalan (seperti rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, guardrail, cermin tikung, dan perlengkapan keselamatan lainnya) dilakukan secara berkala, sesuai standar teknis, serta efektif dalam mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan pada Tahun 2025 telah terlaksana 2 Kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 2 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.12 Grafik Capaian IKK Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025 Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini rincian capaian setiap Triwulan untuk Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025.

Tabel II.13 Target dan Realisasi Kinerja Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	2	2	2
2.	Realisasi	0	1	2
3.	Capaian	0%	50%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
4. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)
6. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan memiliki target sebesar 2 Kegiatan.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan jadwal pemeliharaan yang jelas;
2. SDM Pengawas yang kompeten;
3. SOP pengawasan dan evaluasi teknis yang terstandar;
4. Koordinasi yang baik antar Instansi.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebagai berikut :

1. Tidak ada perencanaan dan jadwal pemeliharaan yang terstruktur;
2. Kurangnya SDM Pengawas dan minim kompetensi;
3. Tidak tersedianya SOP dan instrument evaluasi teknis;
4. Minimnya anggaran dan sarana pendukung.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IKK\ 9.d = \frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan}}{\text{Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan}}$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan pada Tahun 2025 diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan:

1. Alokasi anggaran pemeliharaan dan pengawasan secara proporsional;
2. Digitalisasi pengawasan dan pelaporan;
3. Penyusunan rencana dan jadwal pemeliharaan yang terintegrasi.

6. IKK 9.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

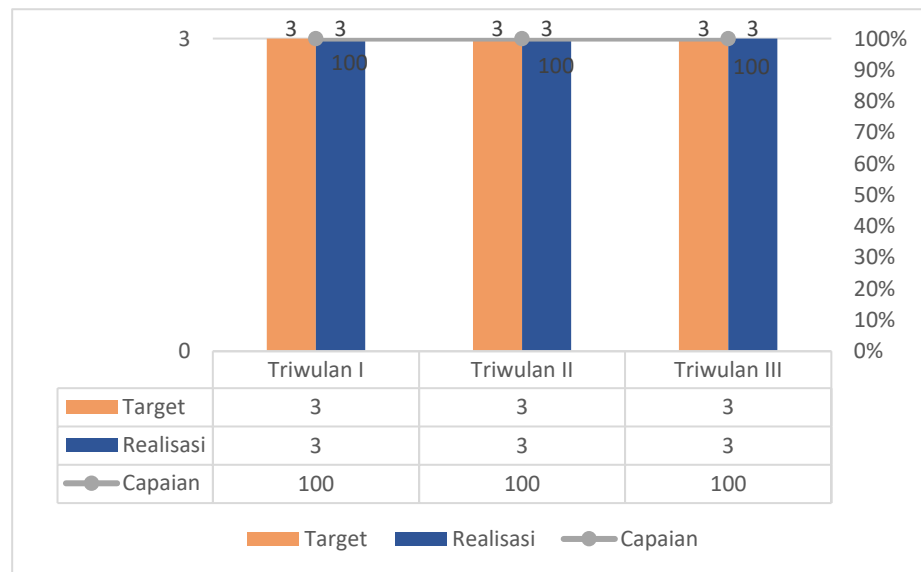
Fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung keselamatan adalah sarana dan prasarana yang dirancang, dibangun, serta dikelola dengan tujuan utama untuk mengawasi dan memastikan bahwa kendaraan angkutan barang mematuhi batas muatan yang telah ditetapkan, guna mencegah risiko kecelakaan lalu lintas serta kerusakan infrastruktur jalan. Adapun pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, yaitu:

1. UPPKB Muara Tembesi (Beroperasi);
2. UPPKB Jambi Merlung (Beroperasi);
3. UPPKB Pelawan Sarolangun (Beroperasi);

4. UPPKB Sungai Penuh (Tidak Beroperasi/Jaga Aset);

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan Tahun 2025 sebesar 3 Lokasi jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3 Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.13 Grafik Capaian IKK Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan untuk Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan Tahun 2025.

Tabel II.14 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	3	3	3
2.	Realisasi	3	3	3
3.	Capaian	100%	100%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk

mendukung Keselamatan terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan memiliki target sebesar 3 Lokasi.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan sebagai berikut :

1. Ketersediaan infrastruktur yang memadai;
2. Sistem manajemen dan pengawasan yang efektif;
3. Ketersediaan dan kompetensi SDM;
4. Integrasi sistem informasi.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan sebagai berikut:

1. Infrastruktur yang tidak memadai;
2. SDM tidak kompeten atau tidak profesional;
3. Tidak terintegrasi dengan sistem informasi Nasional.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IKK \ 9.3 = \text{Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung keselamatan}$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 4.693.289.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 2.969.949.666,- atau mencapai 63,28% dengan nomenklatur pada POK yaitu Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola, Kode Anggaran: 4639.CDP.077.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Peningkatan infrastruktur dan teknologi;
2. Penguatan kapasitas dan integritas SDM;
3. Integrasi sistem informasi.

2.3.4 Sasaran Kegiatan 10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi *Active dan Passive Safety*

Pencapaian Sasaran Kegiatan 10 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman
2. IKK 10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah

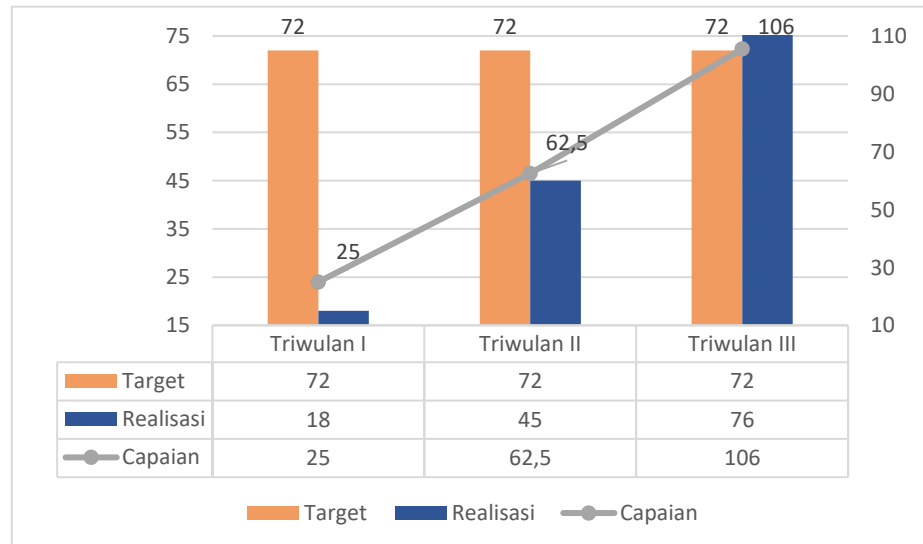
1. IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan adalah serangkaian proses pemeriksaan langsung terhadap fisik kendaraan bermotor hasil produksi, untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut sesuai dengan desain teknis atau rancang bangun yang telah disahkan dalam Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB), dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025 telah terlaksana sebesar 76 Kegiatan, jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 72 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 62,5%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.14 Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025.

Tabel II.15 Target dan Realisasi Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	72	72	72
2.	Realisasi	18	45	76
3.	Capaian	25%	62,5%	106%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman memiliki target sebesar 72 Kegiatan.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman sebagai berikut :

1. SDM Penguji yang kompeten dan bersertifikasi;
2. Tersedianya peralatan dan fasilitas uji yang lengkap dan akurat;
3. Standar pemeriksaan dan SOP yang terpadu.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman sebagai berikut :

1. Kurangnya kompetensi SDM;
2. Tidak tersedianya peralatan dan fasilitas uji yang lengkap dan akurat;
3. Tidak tersedianya anggaran pelaksanaan kegiatan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025:

$$IKK\ 10.1 = \text{Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan}$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{76}{72} \times 100\% = 106\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai

dengan pedoman pada Tahun 2025 diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Penguatan kompetensi SDM;
2. Penguatan prosedur pemeriksaan;
3. Kolaborasi dan koordinasi dengan Instansi terkait.

2. IKK 10.2 Jumlah Kegiatan terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah

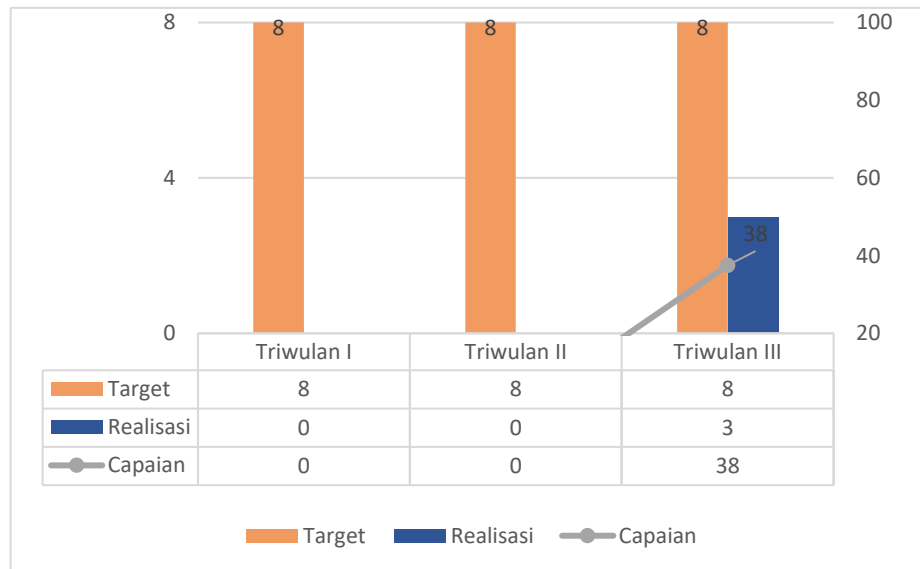
a.1) Definisi Indikator Kinerja

Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah adalah kegiatan untuk memastikan bahwa alat-alat uji yang digunakan dalam pengujian berkala kendaraan bermotor di wilayah daerah (UPUBKB) memiliki tingkat akurasi dan presisi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses ini dilakukan secara berkala oleh lembaga kalibrasi terakreditasi agar hasil pengujian kendaraan dapat diandalkan dan sah secara hukum. Adapun pelaksanaan kegiatan indikator tersebut yaitu:

1. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Kota dan Kabupaten wilayah Provinsi Jambi dengan target 7 Kegiatan;
2. Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor dengan target 1 Kegiatan.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Indikator Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah Tahun 2025 telah terlaksana 3 Kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 8 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.15 Grafik Capaian IKK Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah Tahun 2025.

Tabel II.16 Target dan Realisasi Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	8	8	8
2.	Realisasi	0	0	3
3.	Capaian	0%	0%	38%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah memiliki target sebesar 8 Kegiatan.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah sebagai berikut :

1. Ketersediaan alat uji sesuai standar;
2. Tersedianya anggaran kegiatan;
3. Koordinasi dengan Instansi terkait.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah sebagai berikut :

1. Keterlambatan atau tidak dilakukan kalibrasi;
2. Kondisi alat uji yang tidak layak;
3. Kurangnya kompetensi Petugas;
4. Keterbatasan anggaran kegiatan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja Indikator Kegiatan Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

$$IKK\ 10.2 = \text{Jumlah Kegiatan terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah}$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{3}{8} \times 100\% = 38\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah pada Tahun 2025 diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Penjadwalan kalibrasi yang terencana dan terintegrasi;
2. Peningkatan kompetensi SDM;
3. Perawatan dan Penggantian alat secara berkala.

2.3.5 Sasaran Kegiatan 12 Meningkatnya kesadaran & *attitude* pengguna jalan berkeselamatan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 12 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda

1. IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda

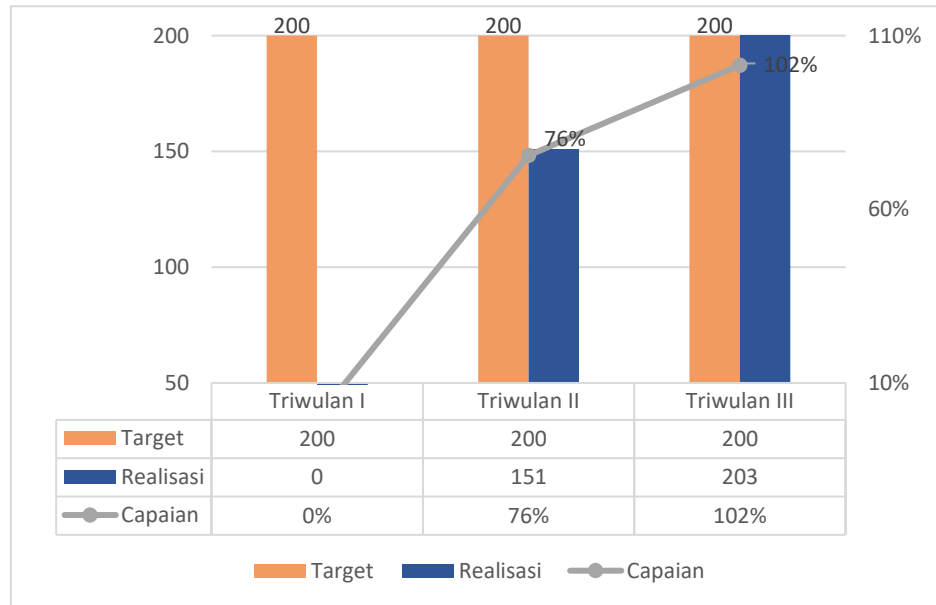
a.1) Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (Salud) adalah suatu bentuk kegiatan edukatif yang ditujukan kepada anak-anak usia dini (3–6 tahun) untuk menanamkan pemahaman dasar, sikap positif, dan perilaku aman dalam berlalu lintas, yang dilakukan melalui metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini seperti bermain, bernyanyi, mendongeng, simulasi, dan visualisasi, serta mengacu pada pedoman keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Indikator Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda Tahun 2025 sebesar 203 Orang, jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 200 Orang, maka capaian kinerja mencapai 76%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK:

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025



Gambar II.16 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman Tahun 2025.

Tabel II.17 Target dan Realisasi Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	200	200	200
2.	Realisasi	0	151	203
3.	Capaian	0%	76%	102%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan**a. Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 75 Tahun 2021 tentang Pendidikan dan Kampanye Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman memiliki target sebesar 200 Orang.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sebagai berikut :

1. Kesesuaian metode dengan karakteristik anak usia dini;
2. Adanya pedoman atau modul resmi;
3. Dukungan Lembaga Pendidikan.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sebagai berikut:

1. Metode pengajaran tidak sesuai usia anak;
2. Tidak tersedianya pedoman atau modul pembelajaran;
4. Kurangnya dukungan dari Lembaga Pendidikan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sebagai berikut:

$$IKK12.2 = \frac{\text{Jumlah Orang terealisasi pada tahun } (n)}{\text{Jumlah Orang yang direncanakan}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{203}{200} \times 100\% = 102\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Pagu Anggaran Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Penguatan materi dan panduan pengajaran;
2. Penyediaan media dan alat peraga edukatif;
3. Kolaborasi dengan Instansi terkait.

2.3.6 Sasaran Kegiatan IKP 4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub

Pencapaian Sasaran Kegiatan IKP 4 diukur melalui 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat;
2. IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat;
3. IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan;
4. IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat;
5. IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan;
6. IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat;
7. IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat;
8. IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor);
9. IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa;
10. IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja;
11. IKK 4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI.

1. IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

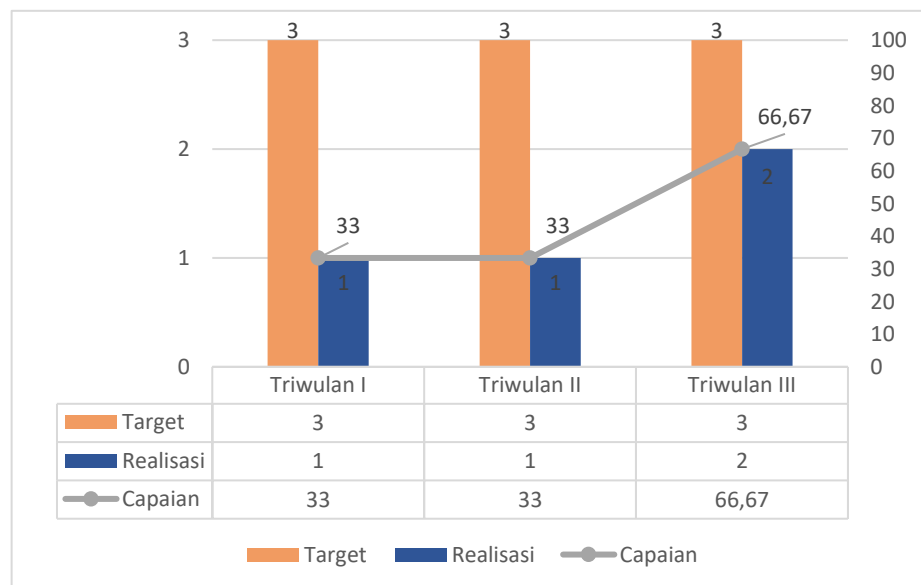
Kegiatan Perencanaan Pembangunan adalah proses sistematis, terencana, dan terpadu yang dilakukan untuk menentukan arah, tujuan,

kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, daerah, atau sektoral. Adapun pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yaitu:

1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan;
2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif;
3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Indikator Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 telah terlaksana sebanyak 2 Kegiatan yaitu Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan dan Penyusunan RKKL Pagu Indikatif, untuk Penyusunan RKKL Pagu Alokasi masih tahap penyusunan jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 33%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK:



Gambar II.17 Grafik Capaian IKK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025.

Tabel II.18 Target dan Realisasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	3	3	3
2.	Realisasi	1	1	2
3.	Capaian	33%	33%	66,67%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 9 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat memiliki target sebesar 3 Kegiatan.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan kualitas data;
2. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan lain;
3. Ketersediaan anggaran.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

1. Data tidak akurat atau tidak tersedia;
2. Lemahnya kapasitas SDM Perencana;
3. Rencana tidak realistis.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

$$IKK\ 4.1 = \frac{\text{Jumlah Kegiatan terealisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2}{3} \times 100\% = 66,67\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Pagu Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat menggunakan pagu anggaran Pengelolaan Bidang Ketatausahaan. Anggaran tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data;
2. Memperkuat kapasitas SDM Perencana;
3. Menjamin konsistensi dengan dokumen perencanaan lain.

2. IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

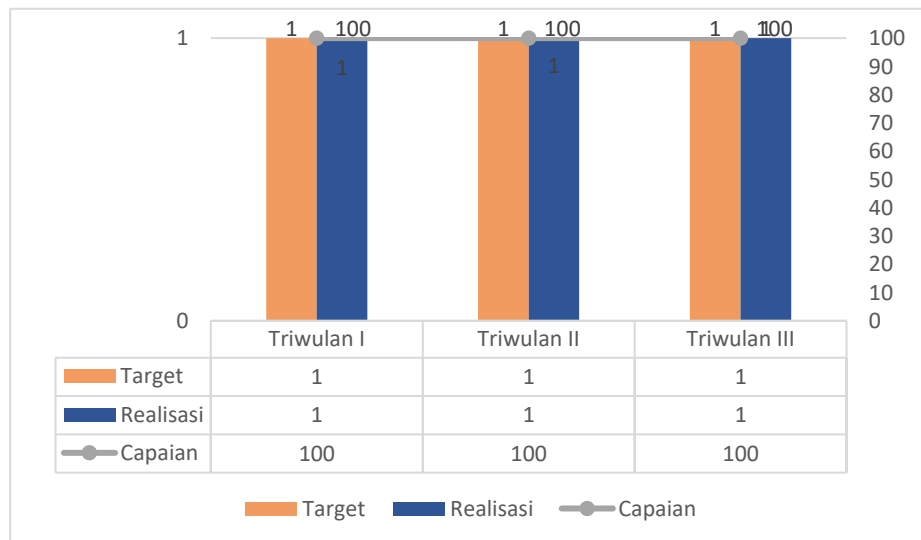
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Adapun pelaksanaan kegiatan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu penyusunan dokumen sebagai berikut:

1. Rencana Strategis;
2. Rencana Kinerja Tahunan;
3. Perjanjian Kinerja;
4. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
5. Monitoring Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
6. Dokumen Laporan Lainnya.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Indikator Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 merupakan penyusunan Dokumen SAKIP dengan realisasi sebesar 1 Dokumen, jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 Dokumen, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK:



Gambar II.18 Grafik Capaian IKK Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025.

Tabel II.19 Target dan Realisasi Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	1	1	1
2.	Realisasi	1	1	1
3.	Capaian	100%	100%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat memiliki target sebesar 1 Dokumen.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

1. Kualitas perencanaan kinerja;
2. SDM yang kompeten dan terlatih;
3. Sistem informasi kinerja yang efektif;
4. Monitoring dan evaluasi berkala.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

1. Kualitas perencanaan kinerja yang buruk;

2. SDM yang tidak memadai;
3. Sistem informasi kinerja yang lemah;

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

$$IKK\ 4.2 = \frac{Jumlah\ Dokumen\ terealisasi\ pada\ tahun\ (n)}{Jumlah\ Dokumen\ yang\ direncanakan} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Pagu Anggaran Pelaksanaan Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat menggunakan pagu anggaran Pengelolaan Bidang Ketatausahaan. Anggaran tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perbaikan perencanaan kinerja secara terintegrasi;
2. Tingkatkan kapasitas SDM;
3. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi.

3. IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan

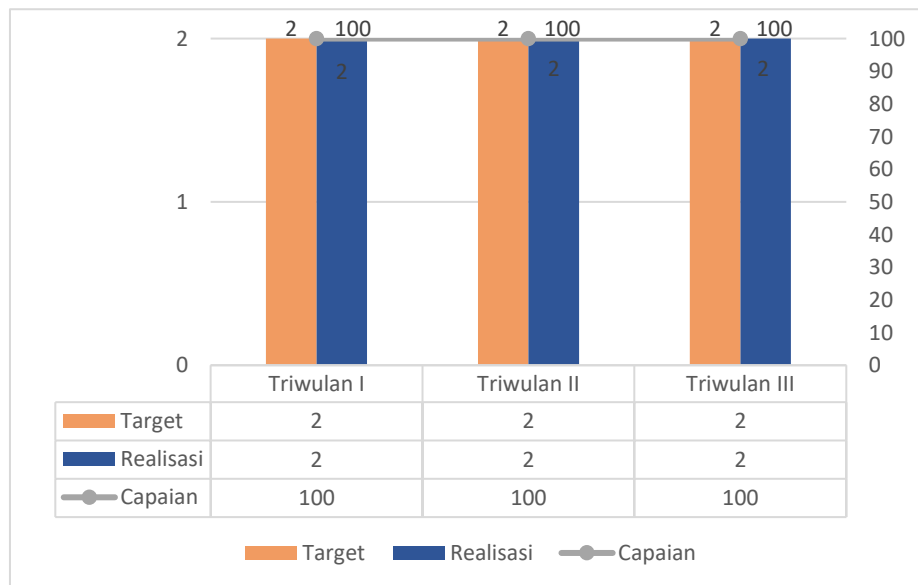
a.1) Definisi Indikator Kinerja

Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada suatu instansi pemerintah, yang menggambarkan kemampuan instansi dalam mengelola risiko, memastikan akuntabilitas, serta mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun pelaksanaan kegiatan pada Indikator Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan yaitu;

1. Penyusunan Dokumen SPIP;
2. Penyusunan Dokumen MR.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Indikator Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 merupakan kegiatan penyusunan Dokumen SPIP dan Dokumen Manajemen Resiko dengan realisasi sebanyak 2 Dokumen, jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 2 Dokumen, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK:



Gambar II.19 Grafik Capaian IKK Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025.

Tabel II.20 Target dan Realisasi Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	2	2	2
2.	Realisasi	2	2	2
3.	Capaian	100%	100%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

b. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan memiliki target sebesar 2 Dokumen.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan sebagai berikut:

1. Ketersediaan kebijakan dan pedoman internal;
2. SDM yang kompeten dan terlatih;
3. Integrasi dengan proses bisnis.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan sebagai berikut:

1. SPIP dan MR tidak terintegrasi dalam proses bisnis;
2. SDM tidak memahami SPIP dan MR;
3. Tidak adanya budaya sadar risiko di Organisasi.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan sebagai berikut:

$$IKK\ 4.3 = \frac{\text{Jumlah Dokumen terealisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Dokumen yang direncanakan}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Pagu Anggaran Pelaksanaan Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan menggunakan pagu anggaran Pengelolaan Bidang Ketatausahaan. Anggaran tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Membuat pedoman SPIP dan MR;
2. Penguatan SDM;
3. Integrasi SPIP dan MR dengan perencanaan kinerja.

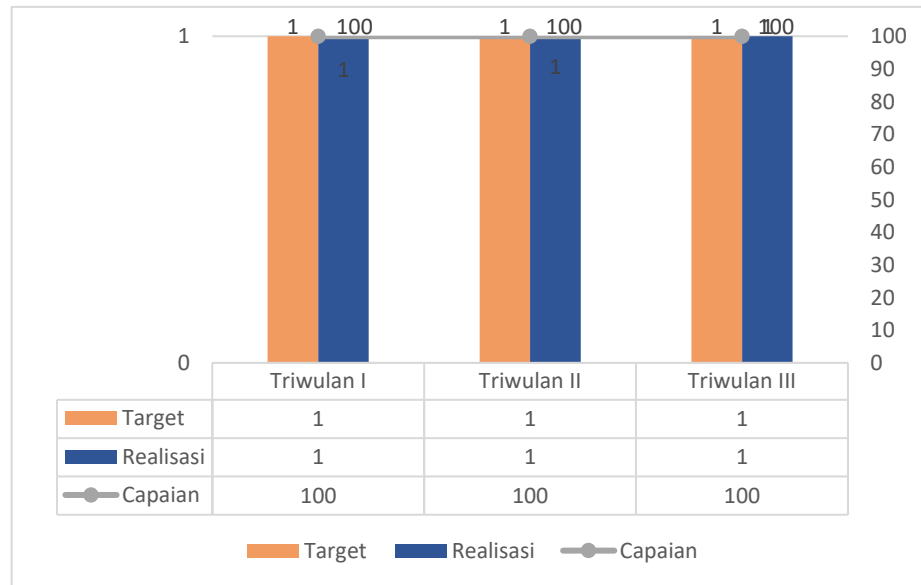
4. IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas dalam penggunaan anggaran negara oleh instansi pemerintah, guna mendukung pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Indikator Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebesar 1 Kegiatan, jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK:



Gambar II.20 Grafik Capaian IKK Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025.

Tabel II.21 Target dan Realisasi Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	1	1	1
2.	Realisasi	1	1	1
3.	Capaian	100%	100%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat memiliki target sebesar 1 Kegiatan.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Perhubungan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan IKPA;
2. Koordinasi internal yang efektif;
3. Pemanfaatan teknologi dan sitem informasi.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

1. Kualitas SDM Pengelola Anggaran Rendah;
2. Frekuensi Revisi DIPA tinggi;
3. Tidak adanya rencana aksi peningkatan kinerja anggaran;

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

$$IKK\ 4.4 = \frac{Jumlah\ Kegiatan\ terealisasi\ pada\ tahun\ (n)}{Jumlah\ Kegiatan\ yang\ direncanakan} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Pagu Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat menggunakan pagu anggaran Pengelolaan Bidang Ketatausahaan. Anggaran tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

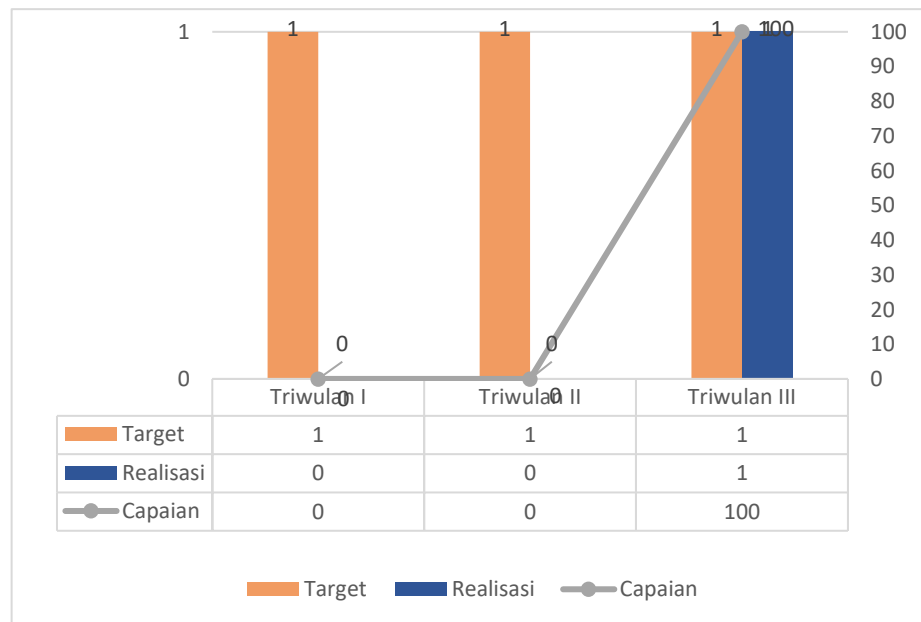
1. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Anggaran;
2. Perbaikan perencanaan anggaran dan penjadwalan kegiatan;
3. Pengendalian Revisi DIPA;
4. Penyusunan dan eksekusi rencana aksi peningkatan IKPA.

5. IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan**a.1) Definisi Indikator Kinerja**

Tingkat lanjut rekomendasi audit/pemeriksaan adalah proses tindak lanjut sistematis yang dilakukan oleh entitas yang diaudit terhadap temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor (seperti BPK, BPKP, Inspektorat, atau APIP lainnya), dengan tujuan untuk Memastikan bahwa rekomendasi tersebut diimplementasikan secara efektif, menyelesaikan permasalahan yang ditemukan, dan mencegah terulangnya penyimpangan atau kelemahan yang sama di masa mendatang.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Tahun 2025 merupakan kegiatan Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Berbasis Resiko yang telah terealisasi sebanyak 1 Dokumen, jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 Dokumen, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK:



Gambar II.21 Grafik Capaian IKK Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Kegiatan Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Tahun 2025.

Tabel II.22 Target dan Realisasi Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	1	1	1
2.	Realisasi	0	0	1
3.	Capaian	0%	0%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan memiliki target sebesar 1 Kegiatan.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Ketersediaan Tim dan PIC tindak lanjut yang kompeten;
2. Kualitas tindak lanjut yang sesuai substansi rekomendasi;
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Tidak tersedianya Tim/PIC tindak lanjut yang jelas;
2. Ketidaktepatan dalam menafsirkan rekomendasi;
3. Temuan terus berulang (*Repeat Findings*).

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan sebagai berikut:

$$IKK\ 4.5 = \frac{\text{Jumlah Dokumen terealisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Dokumen yang direncanakan}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Pagu Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan menggunakan pagu anggaran Pengelolaan Bidang Ketatausahaan. Anggaran tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Pembentukan Tim tindak lanjut atau PIC khusus;
2. Audit internal ulang (*Follow-up Review*);
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal.

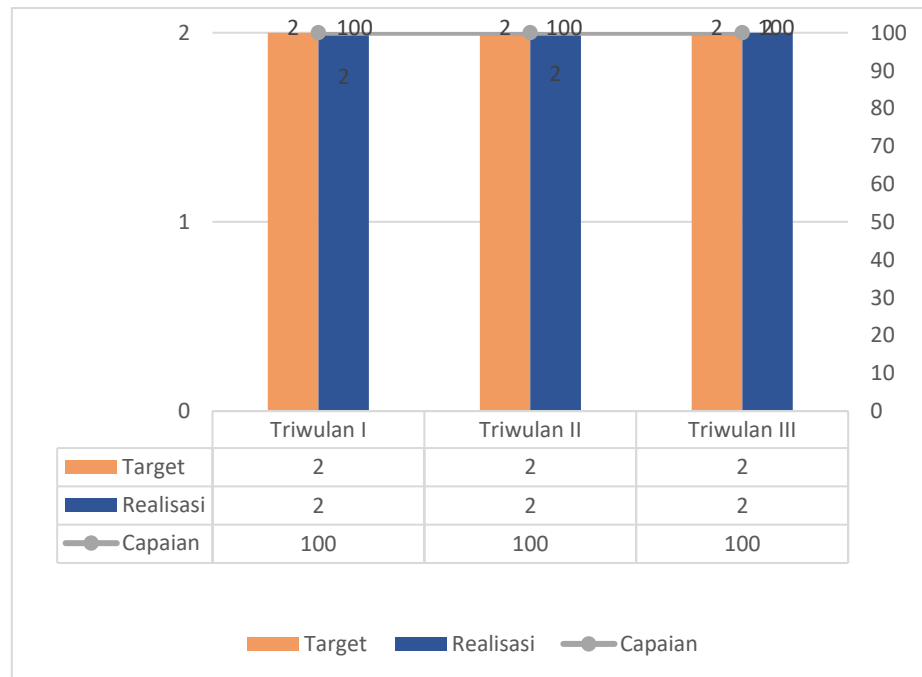
6. IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat**a.1) Definisi Indikator Kinerja**

Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis untuk merencanakan, menginventarisasi, menggunakan, mengamankan, memelihara, menilai, serta menghapus dan mengalihkan Barang Milik Negara (BMN) dengan tujuan memastikan aset tersebut dikelola secara optimal, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun pelaksanaan kegiatan pada Indikator tersebut yaitu:

1. Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset;
2. Kegiatan Penatausahaan BMN.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Indikator Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebesar 2 Dokumen, jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 2 Dokumen, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK:



Gambar II.22 Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025.

Tabel II.23 Target dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	2	2	2
2.	Realisasi	2	2	2
3.	Capaian	100%	100%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat memiliki target sebesar 2 Dokumen.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan kompetensi SDM Pengelola Aset;
2. Optimalisasi pemanfaatan aset;
3. Pemeliharaan dan pengamanan fisik aset.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

1. SDM Pengelola aset tidak memadai;
2. Ketidaktertiban administrasi dan pencatatan;
3. Pemanfaatan aset tidak optimal.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

$$IKK\ 4.6 = \frac{\text{Jumlah Dokumen terealisasi pada tahun } (n)}{\text{Jumlah Dokumen yang direncanakan}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Pagu Anggaran Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat menggunakan pagu anggaran Pengelolaan Bidang Ketatausahaan. Anggaran tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Peningkatan kapasitasd SDM Pengelola aset;
2. Rekonsiliasi dan pelaporan berkala;
3. Optimalisasi pemanfaatan aset;
4. Percepatan penghapusan aset rusak/tidak digunakan.

7. IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat

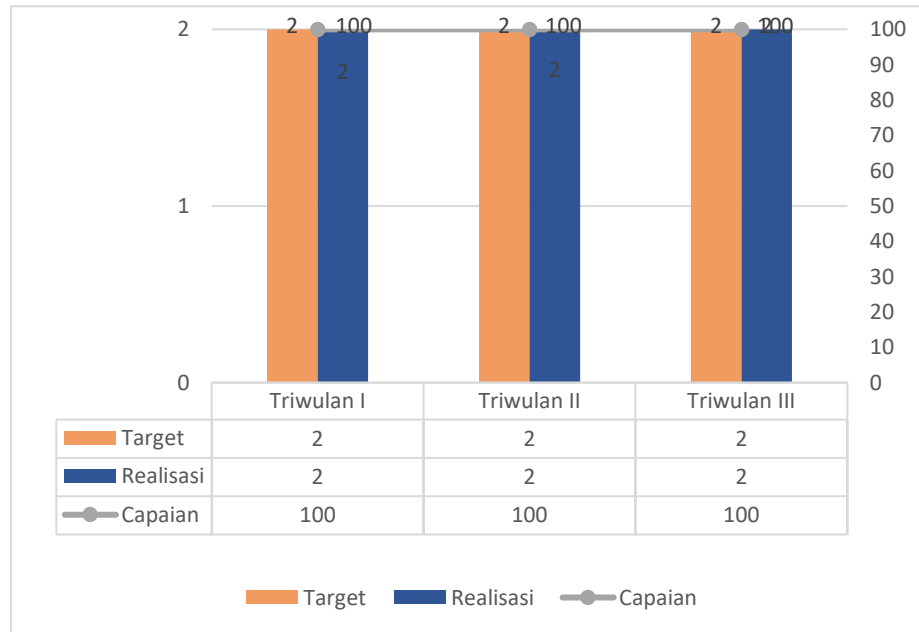
a.1) Definisi Indikator Kinerja

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang sudah diselesaikan (Skor) adalah indikator kualitas penanganan pengaduan masyarakat melalui sistem nasional SP4N-LAPOR. Adapun pelaksanaan kegiatan pada Indikator tersebut yaitu;

1. Kegiatan Humas;
2. Kegiatan PPID.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Indikator Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebesar 2 Kegiatan, jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 2 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK:



Gambar II.23 Grafik Capaian IKK Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025.

Tabel II.24 Target dan Realisasi Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	2	2	2
2.	Realisasi	2	2	2
3.	Capaian	100%	100%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat memiliki target sebesar 2 Kegiatan.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

1. Tim pengelola dan PIC yang jelas;
2. Respons cepat dan substansial;
3. Transparansi, keterbukaan dan pelaporan publik.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

1. SDM yang tidak kompeten dan kurang terlatih;
2. Masyarakat belum sepenuhnya memahami proses pelaporan dan ekspektasi tindak lanjut sehingga partisipasi rendah;
3. Waktu penanganan yang lambat.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

$$IKK\ 4.7 = \frac{\text{Jumlah Kegiatan terealisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Pagu Anggaran Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat menggunakan pagu anggaran Pengelolaan Bidang Ketatausahaan. Anggaran tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Peningkatan kapasitas SDM;
2. Tingkat kesigapan respons dan penyelesaian;
3. Pengoptimalan teknologi dan fitur aplikasi seperti: SP4N-LAPOR!.

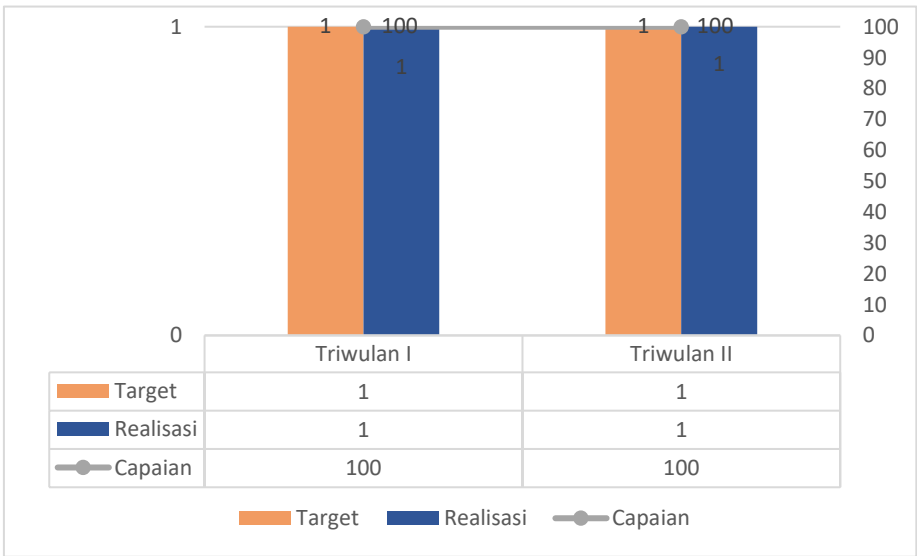
8. IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)**a.1) Definisi Indikator Kinerja**

Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) adalah proses alih media dokumen atau arsip dari format fisik ke dalam format elektronik, yang mewujudkan:

1. Pelestarian fisik: Dokumen tidak mudah rusak;
2. Keteraturan administrasi: Arsip terorganisir dengan sistematis;
3. Kemudahan akses dan pencarian: Memudahkan pengguna (ASN maupun publik) dalam memperoleh informasi;
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SPBE: Mendukung sistem Pemerintahan digital dan tata Kelola yang baik.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Indikator Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) Tahun 2025 sebesar 1 Kegiatan melalui penggunaan Aplikasi Srikandi dan digitalisasi dokumen keuangan terkait kegiatan layanan perkantoran, jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK:



Gambar II.24 Grafik Capaian IKK Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) Tahun 2025.

Tabel II.25 Target dan Realisasi Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	1	1	1
2.	Realisasi	1	1	1
3.	Capaian	100%	100%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) memiliki target sebesar 1 Kegiatan.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) sebagai berikut:

1. Kompetensi dan Pelatihan SDM;
2. Pengamanan data dan manajemen keamanan;
3. Aksesibilitas, integrasi dan kolaborasi;
4. Sistem backup dan pemulihan.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) sebagai berikut:

1. SDM yang tidak kompeten dan minim pelatihan;
2. Implementasi digitalisasi berjalan lambat dan tidak optimal;
3. Keamanan data lemah;
4. Masalah migasi dokumen.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) sebagai berikut:

$$IKK\ 4.8 = \frac{\text{Jumlah Kegiatan terealisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 3.448.522.000. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 2.364.318.985,- atau mencapai 68,56% dengan nomenklatur pada POK yaitu Layanan Perkantoran, Kode Anggaran: 4670.EBA.994.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Pelatihan dan pengembangan SDM Arsiparis;
2. Penerapan Aplikasi Srikandi;
3. Sosialisasi dan budaya kerja elektronik.

9. IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**a.1) Definisi Indikator Kinerja**

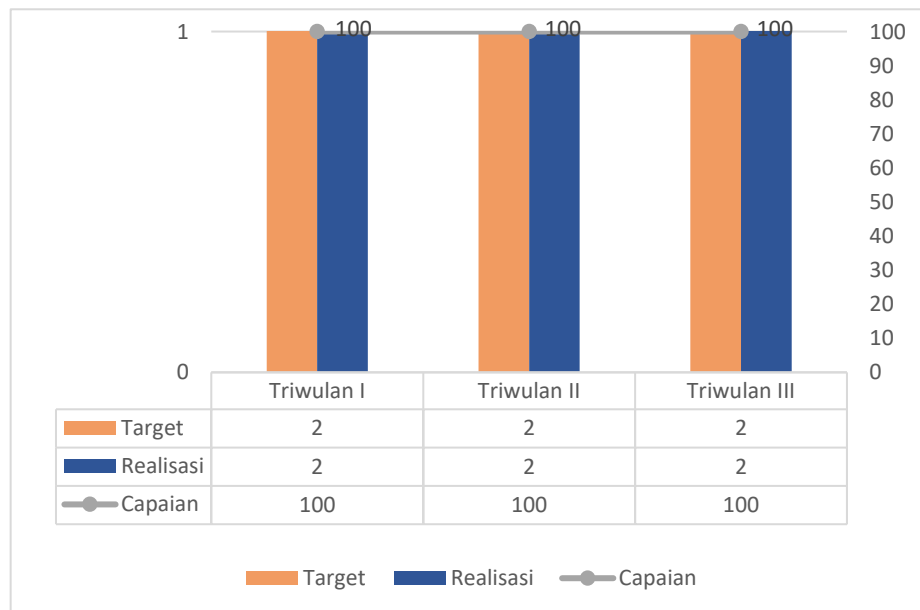
Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah rangkaian sistem, mekanisme dan proses yang dirancang untuk menjamin agar setiap tahap pengadaan mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima dilakukan secara efisien, transparan, akuntabel, kompetitif, dan berintegritas tinggi, sesuai dengan prinsip *good governance* dan peraturan perundang-undangan.

Adapun pelaksanaan kegiatan pada indikator tersebut yaitu:

1. Kegiatan Belanja Bahan (Belanja Keperluan Kantor);
2. Kegiatan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK).

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Indikator Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar 2 Kegiatan, jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 2 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK:



Gambar II.25 Grafik Capaian IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.

Tabel II.26 Target dan Realisasi Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	2	2	2
2.	Realisasi	2	2	2
3.	Capaian	100%	100%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia di Lingkungan Kemenhub.
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa memiliki target sebesar 2 Kegiatan.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:

1. Kompetensi dan Pelatihan SDM;
2. Perencanaan terstruktur dan manajemen risiko;
3. Transparansi dan publikasi data pengadaan.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:

1. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas;
2. Korupsi, intervensi politik dan nepotisme;
3. SDM kurang kapasitas dan kompetensi;
4. Manajemen kontrak dan monitoring yang buruk.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:

$$IKK\ 4.9 = \frac{\text{Jumlah Kegiatan terealisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2025 yaitu dengan nomenklatur pada POK yaitu Belanja Bahan sebesar Rp. 120.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 59.951.840,- atau mencapai 49,96% dan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp. 100.000.000 adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 68.885.500.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Pelatihan intensif bagi PPK dan Tim Pengadaan Barang Jasa;
2. Transparansi ekstrim dan akuntabilitas;
3. Audit dan pengawasan terstruktur.

10. IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja

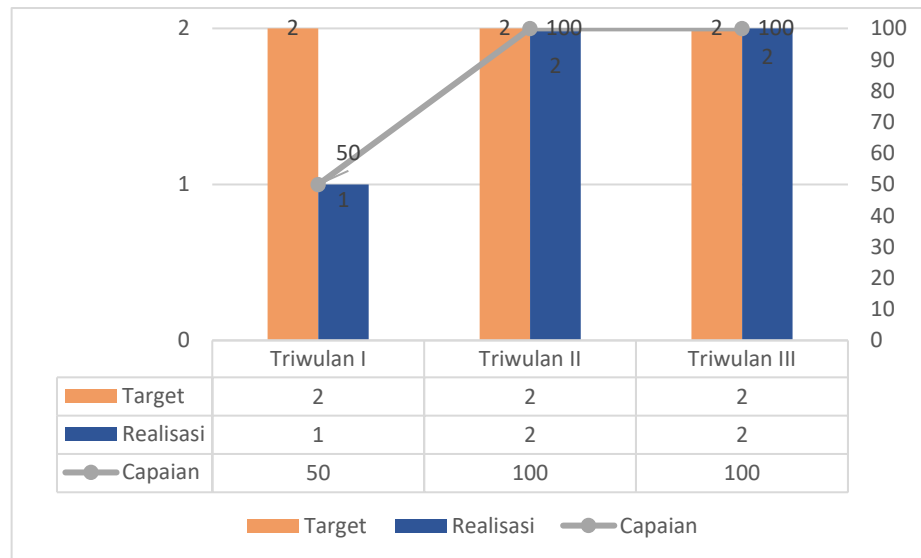
a.1) Definisi Indikator Kinerja

Pengembangan SDM adalah proses sistematis dan berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap individu dalam Organisasi baik untuk jabatan saat ini maupun untuk kebutuhan masa depan. Adapun pelaksanaan kegiatan pada Indikator tersebut yaitu:

1. Kegiatan terkait pengelolaan gaji dan tunjangan;
2. Kegiatan terkait peningkatan kompetensi SDM.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Indikator Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Tahun 2025 sebesar 2 Kegiatan, jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 2 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK:



Gambar II.26 Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja.

Tabel II.27 Target dan Realisasi Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	2	2	2
2.	Realisasi	1	2	2
3.	Capaian	50%	100%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 46 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kemenhub.
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 14 Tahun 2022 tentang Akreditasi Penyelenggaraan Pelatihan SDM Bidang Transportasi Darat.
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja memiliki target sebesar 2 Kegiatan.

c. Faktor-faktor Keberhasilan:

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja sebagai berikut:

1. Budaya Organisasi yang mendukung pembelajaran;
2. SDM kompeten dan pelatihan yang relevan;
3. Perencanaan kompetensi dan analisis kebutuhan (TNA).

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran dan sumber daya;
2. Ketidaktepatan analisis kebutuhan pelatihan (TNA);
3. Desain pelatihan pasif dan minim praktek.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja sebagai berikut:

$$IKK\ 4.10 = \frac{\text{Jumlah Kegiatan terealisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 27.027.280.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 19.114.272.274,- atau mencapai 70,72% dengan nomenklatur pada POK yaitu Layanan Perkantoran, Kode Anggaran: 4671.EBA.994.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

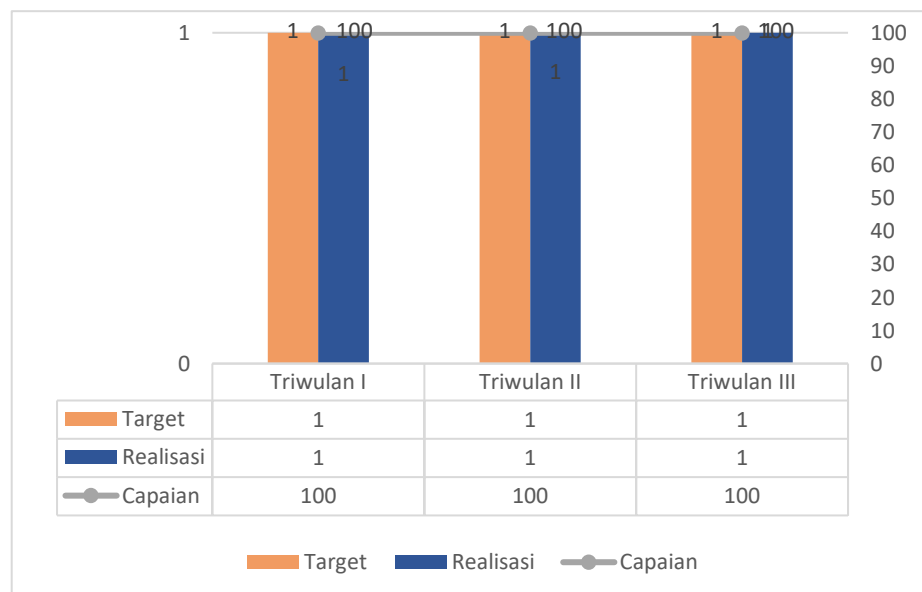
1. Melakukan analisis kebutuhan kompetensi (TNA) yang akurat;
2. Merancang pelatihan yang tepat sasaran dan beragam;
3. Membangun SDM yang kompeten dan berintegrasi.

11. IKK 4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI**a.1) Definisi Indikator Kinerja**

Kegiatan mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah segala bentuk aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu, unit kerja, atau instansi pemerintah untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang prima.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Indikator Kegiatan mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 sebesar 1 Kegiatan, jika dibandingkan dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK:



Gambar II.27 Grafik Capaian IKK Kegiatan mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Kegiatan mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI).

Tabel II.28 Target dan Realisasi Kegiatan mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Target	1	1	1
2.	Realisasi	1	1	1
3.	Capaian	100%	100%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Kegiatan mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) terhadap target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) memiliki target sebesar 1 Kegiatan.

c. Faktor-faktor Keberhasilan:

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan dan Pegawai;
2. Implementasi program yang konsisten;
3. Budaya kerja berbasis integritas.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai berikut:

1. Partisipasi Pegawai rendah;
2. Kegiatan tidak terintegrasi dengan Reformasi Birokrasi;
3. Resistensi terhadap perubahan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai berikut:

$$IKK\ 4.11 = \frac{\text{Jumlah Kegiatan terealisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Pagu Anggaran Kegiatan mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) menggunakan pagu anggaran Pengelolaan Bidang Ketatausahaan. Anggaran tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Penguatan komitmen Pimpinan dan Tim ZI;
2. Internalisasi Budaya Integritas dan Pelayanan;
3. Integrasi ZI dengan program Reformasi Birokrasi.

II.3. Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025

1. Pagu Anggaran

a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025

Pagu per Triwulan III DIPA TA. 2025 sebesar **Rp. 77.626.035.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.29 Rincian per Sumber Dana Triwulan III Tahun 2025

Sumber Dana	Pagu (Rp)	%
RM	74.103.875.000	95,46%
PNBP	3.522.160.000	4,54%
SBSN	-	-
Total	77.626.035.000	100%

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025

Pagu per Triwulan III DIPA TA. 2025 sebesar **Rp. 77.626.035.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.30 Rincian per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
Belanja Pegawai	27.027.280.000	34,82%
Belanja Barang	34.729.021.000	44,74%
Belanja Modal	15.869.734.000	20,44%
Total	77.626.035.000	100%

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Berikut uraian surat pengesahan revisi anggaran sampai dengan Tahun 2025 :

1. Pagu Anggaran awal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 78.407.073.000;
2. Revisi Ke-1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2025 tanggal 15 Januari 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 78.407.073.000;
3. Revisi Ke-2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2025 tanggal 22 Februari 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 78.407.073.000;
4. Revisi Ke-3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 78.407.073.000.
5. Revisi Ke-4 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2025 tanggal 23 April 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 78.407.073.000.
6. Revisi Ke-5 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2025 tanggal 1 Juli 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 78.407.073.000.
7. Revisi Ke-6 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2025 tanggal 16 Juli 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 78.407.073.000.
8. Revisi Ke-7 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2025 tanggal 23 Juli 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 78.407.073.000.

9. Revisi Ke-8 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2025 tanggal 28 Juli 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 78.407.073.000.
10. Revisi Ke-9 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 73.691.035.000.
11. Revisi Ke-10 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2025 tanggal 12 September 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 77.626.035.000.
12. Revisi Ke-11 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2025 tanggal 26 September 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 77.626.035.000.
13. Revisi Ke-12 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2025 tanggal 2 Oktober 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 77.626.035.000.

2. Refocusing Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan dengan adanya Revisi DIPA BPTD Kelas II Jambi yang dilakukan penyesuaian anggaran sebesar 12 kali revisi DIPA. Berikut adalah rincian histori revisi per Sumber Dana dan per Jenis Belanja.

a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025

Tabel II.31 Rincian Revisi per Sumber Dana Tahun 2025

Pagu	Sumber Dana			Jumlah
	RM	PNBP	SBSN	
Pagu Awal	75.189.913.000	3.217.160.000	-	78.407.073.000
Revisi Ke-1	75.189.913.000	3.217.160.000	-	78.407.073.000
Revisi Ke-2	75.189.913.000	3.217.160.000	-	78.407.073.000
Revisi Ke-3	75.189.913.000	3.217.160.000	-	78.407.073.000
Revisi Ke-4	75.189.913.000	3.217.160.000	-	78.407.073.000
Revisi Ke-5	75.189.913.000	3.217.160.000	-	78.407.073.000
Revisi Ke-6	75.189.913.000	3.217.160.000	-	78.407.073.000

Pagu	Sumber Dana			Jumlah
	RM	PNBP	SBSN	
Revisi Ke-7	75.189.913.000	3.217.160.000	-	78.407.073.000
Revisi Ke-8	75.189.913.000	3.217.160.000	-	78.407.073.000
Revisi Ke-9	70.473.875.000	3.217.160.000	-	73.691.035.000
Revisi Ke-10	74.103.875.000	3.522.160.000	-	77.626.035.000
Revisi Ke-11	74.103.875.000	3.522.160.000	-	77.626.035.000
Revisi Ke-12	74.103.875.000	3.522.160.000	-	77.626.035.000

Sumber Data: Aplikasi Satu DJA

b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025**Tabel II.32** Rincian Revisi per Jenis Belanja Tahun 2025

Pagu	Jenis Belanja			Jumlah
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
Pagu Awal	23.776.893.000	41.261.376.000	13.368.804.000	78.407.073.000
Revisi Ke-1	23.776.893.000	41.261.376.000	13.368.804.000	78.407.073.000
Revisi Ke-2	23.776.893.000	41.261.376.000	13.368.804.000	78.407.073.000
Revisi Ke-3	23.776.893.000	41.261.376.000	13.368.804.000	78.407.073.000
Revisi Ke-4	23.776.893.000	41.261.376.000	13.368.804.000	78.407.073.000
Revisi Ke-5	23.776.893.000	41.261.376.000	13.368.804.000	78.407.073.000
Revisi Ke-6	23.776.893.000	41.261.376.000	13.368.804.000	78.407.073.000
Revisi Ke-7	23.776.893.000	41.261.376.000	13.368.804.000	78.407.073.000
Revisi Ke-8	23.776.893.000	41.261.376.000	13.368.804.000	78.407.073.000
Revisi Ke-9	27.027.280.000	33.294.951.000	13.368.804.000	73.691.035.000
Revisi Ke-10	27.027.280.000	36.102.351.000	14.496.404.000	77.626.035.000
Revisi Ke-11	27.027.280.000	36.102.351.000	14.496.404.000	77.626.035.000
Revisi Ke-12	27.027.280.000	34.729.021.000	15.869.734.000	77.626.035.000

Sumber Data: Aplikasi Satu DJA

c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025**Tabel II.33** Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025

Sumber Dana dan Jenis Belanja	Pagu awal	Perubahan	Pagu Triwulan I	Perubahan	Pagu Triwulan II	Perubahan	Pagu Triwulan III
Belanja Pegawai	23.776.893.000	-	23.776.893.000	-	23.776.893.000	3.250.387.000	27.027.280.000
RM	23.776.893.000	-	23.776.893.000	-	23.776.893.000	3.250.387.000	27.027.280.000
PNBP	-	-	-	-	-	-	-
SBSN	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang	41.261.376.000	-	41.261.376.000	-	41.261.376.000	-6.532.355.000	34.729.021.000
RM	41.044.216.000	-	41.044.216.000	-	41.044.216.000	-6.532.355.000	34.511.861.000

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

Sumber Dana dan Jenis Belanja	Pagu awal	Perubahan	Pagu Triwulan I	Perubahan	Pagu Triwulan II	Perubahan	Pagu Triwulan III
PNBP	217.160.000	-	217.160.000	-	217.160.000	-	217.160.000
SBSN	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal	13.368.804.000	-	13.368.804.000	-	13.368.804.000	2.500.930.000	15.869.734.000
RM	10.368.804.000	-	10.368.804.000	-	10.368.804.000	2.195.930.000	12.564.734.000
PNBP	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	305.000.000	3.305.000.000
SBSN	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	78.407.073.000	-	78.407.073.000	-	78.407.073.000	- 781.038.000	77.626.035.000

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2025**Tabel II.34** Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN III
403845	BPTD Kelas II Jambi	78.407.073.000	-	78.407.073.000	-	78.407.073.000	- 781.038.000	77.626.035.000
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	48.133.787.000	-	48.133.787.000	-	48.133.787.000	- 3.913.441.000	44.220.346.000
GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	10.429.810.000	-	10.429.810.000	-	10.429.810.000	- 7.825.910.000	2.603.900.000
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	11.468.791.000	-	11.468.791.000	-	11.468.791.000	- 797.904.000	10.670.887.000
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	22.167.935.000	-	22.167.935.000	-	22.167.935.000	3.690.373.000	25.858.308.000
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.067.251.000	-	4.067.251.000	-	4.067.251.000	1.020.000.000	5.087.251.000
WA	Program Dukungan Manajemen	30.273.286.000	-	30.273.286.000	-	30.273.286.000	3.132.403.000	33.405.689.000
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	242.000.000	-	242.000.000	-	242.000.000	-	242.000.000

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN III
403845	BPTD Kelas II Jambi	78.407.073.000	-	78.407.073.000	-	78.407.073.000	- 781.038.000	77.626.035.000
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.254.393.000	-	6.254.393.000	-	6.254.393.000	- 117.984.000	6.136.409.000
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	23.776.893.000	-	23.776.893.000	-	23.776.893.000	3.250.387.000	27.027.280.000

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2025

Berikut adalah rincian perbandingan pagu dan realisasi Tahun anggaran 2020-2025:

Tabel II.35 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2025

No	Tahun	Pagu Awal (Rp)	Pagu Triwulan I (Rp)	Realisasi Triwulan I (Rp)	%	Pagu Triwulan II (Rp)	Realisasi Triwulan II (Rp)	%	Pagu Triwulan III (Rp)	Realisasi Triwulan III (Rp)	%
1	2020	88.949.535.000	88.649.535.000	12.491.200.597	14,09%	89.049.535.000	34.656.635.261	38,92%	89.669.695.000	57.493.561.263	64,12%
2	2021	129.371.473.000	98.526.002.000	10.833.725.243	11,00%	96.215.998.000	38.486.821.766	40,00%	95.680.949.000	62.411.631.708	65,23%
3	2022	65.786.704.000	61.406.971.000	10.050.537.080	16,37%	61.406.971.000	24.036.621.628	39,14%	62.717.590.000	37.362.333.323	59,57%
4	2023	101.360.757.000	101.360.757.000	14.403.929.167	14,21%	101.642.747.000	44.895.523.029	44,17%	101.710.065.000	74.601.042.699	73,35%
5	2024	88.970.577.000	88.970.577.000	13.079.056.704	14,70%	89.125.808.000	38.087.610.153	42,73%	109.361.095.000	63.640.799.964	58,19%
6	2025	78.407.073.000	78.407.073.000	9.131.397.291	11,65%	78.407.073.000	18.699.290.643	23,85%	77.626.035.000	31.642.898.622	40,76%

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

II.3.2. Realisasi Anggaran Anggaran Tahun 2025**1. Realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025**

Berikut adalah rincian realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025:

Tabel II.36 Rincian realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	REALISASI PAGU PER TRIWULAN I	%	PAGU PER TRIWULAN II	REALISASI PAGU PER TRIWULAN II	%	PAGU PER TRIWULAN III	REALISASI PAGU PER TRIWULAN III	%
403845	BPTD Kelas II Jambi	78.407.073.000	78.407.073.000	9.131.397.291	11,6%	78.407.073.000	18.699.290.643	23,85%	77.626.035.000	31.642.898.622	40,76%
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	48.133.787.000	48.133.787.000	1.834.960.230	3,8%	48.133.787.000	4.618.249.106	9,59	44.220.346.000	10.039.836.113	22,70
GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	10.429.810.000	10.429.810.000	-	0%	10.429.810.000	603.373.680	5,79	2.603.900.000	1.530.787.478	58,79
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	11.468.791.000	11.468.791.000	816.239.538	7,1%	11.468.791.000	1.830.265.953	15,96	10.670.887.000	4.474.676.871	41,93
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	22.167.935.000	22.167.935.000	963.647.192	4,3%	22.167.935.000	2.129.535.973	9,61	25.858.308.000	3.979.298.264	15,39
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.067.251.000	4.067.251.000	55.073.500	1,4%	4.067.251.000	55.073.500	1,35	5.087.251.000	55.073.500	1,08
WA	Program Dukungan Manajemen	30.273.286.000	30.273.286.000	7.296.437.061	24,1%	30.273.286.000	14.081.041.537	46,51	33.405.689.000	21.603.062.509	64,67
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	242.000.000	242.000.000	-	0%	242.000.000	-	-	242.000.000	-	0

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	REALISASI PAGU PER TRIWULAN I	%	PAGU PER TRIWULAN II	REALISASI PAGU PER TRIWULAN II	%	PAGU PER TRIWULAN III	REALISASI PAGU PER TRIWULAN III	%
403845	BPTD Kelas II Jambi	78.407.073.000	78.407.073.000	9.131.397.291	11,6%	78.407.073.000	18.699.290.643	23,85%	77.626.035.000	31.642.898.622	40,76%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.254.393.000	6.254.393.000	1.335.288.551	21,3%	6.254.393.000	1.983.869.874	31,72	6.136.409.000	2.488.790.235	40,56
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	23.776.893.000	23.776.893.000	5.961.148.510	25,1%	23.776.893.000	12.097.171.663	50,88	27.027.280.000	19.114.272.274	70,72

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025

Berikut adalah rincian realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025:

Tabel II.37 Rincian realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Alokasi (Tw I)	Realisasi Pagu TW I		Pagu Alokasi (Tw II)	Realisasi Pagu TW II		Pagu Alokasi (Tw III)	Realisasi Pagu TW III	
		Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1.	Belanja Pegawai	23.776.893.000	23.776.893.000	5.961.148.510	25,07	23.776.893.000	12.097.171.663	50,88	27.027.280.000	19.114.272.274	70,72
2.	Belanja Barang	41.261.376.000	41.261.376.000	3.170.248.781	7,68	41.261.376.000	6.602.118.980	16,00	34.729.021.000	10.738.080.567	30,92
3.	Belanja Modal	13.368.804.000	13.368.804.000	-	-	13.368.804.000	-	-	15.869.734.000	1.790.545.781	11,28
Total		78.407.073.000	78.407.073.000	9.131.397.291	11,65	78.407.073.000	18.699.290.643	23,85	77.626.035.000	31.642.898.622	40,76

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

3. Realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2025

Berikut adalah rincian realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2025:

Tabel II.38 Rincian realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2025

No.	Sumber Dana	Pagu Awal	Pagu Alokasi (Tw I)	Realisasi Pagu TW I		Pagu Alokasi (Tw II)	Realisasi Pagu TW II		Pagu Alokasi (Tw III)	Realisasi Pagu TW III	
		Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1.	RM	75.189.913.000	75.189.913.000	9.131.397.291	12,14	75.189.913.000	20.309.092.721	27,01	74.103.875.000	30.642.681.230	41,35
2.	PNBP	3.217.160.000	3.217.160.000	-	-	3.217.160.000	-	-	3.522.160.000	1.000.217.392	28,40
3.	SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		78.407.073.000	78.407.073.000	9.131.397.291	11,65	78.407.073.000	20.309.092.721	25,90	77.626.035.000	31.642.898.622	40,76

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

II.3.2.4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang diblokir dikarenakan efisiensi anggaran oleh Unit Kerja pada Tahun Anggaran 2025, detail sebagai berikut:

Tabel II.39 Anggaran Kegiatan yang terkena *Blokir*

Automatic Adjustment	Rp.
Total Pagu Anggaran	77.626.035.000
Total Nilai Terkena AA	20.857.819.000
Akun 52 Belanja Barang	14.238.908.000
Akun 53 Belanja Modal	6.618.911.000

Sumber Data: Aplikasi Satu DJA

II.3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dan Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya manusia:

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

Berikut tabel efisiensi penggunaan sumber daya keuangan Tahun Anggaran 2025

Tabel II.40 Tabel efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
		% Capaian Rata- rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi	% Capaian Rata- rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi	% Capaian Rata- rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi
SK 2.	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	0%	0%	0%	100%	12,57%	87,43%	100%	58,79%	41,21%
SK 7.	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	33%	13%	20,33%	50%	31%	19,00%	56%	60%	-4,44%
SK 9.	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	33%	27,00%	6,33%	42%	61%	-19,33%	50%	64%	-14,00%
SK 10.	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	13%	0%	12,50%	63%	0%	62,50%	106%	0%	105,56%

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
		% Capaian Rata- rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi	% Capaian Rata- rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi	% Capaian Rata- rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi
SK 2.	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	0%	0%	0%	100%	12,57%	87,43%	100%	58,79%	41,21%
SK 12.	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	0%	0%	0%	76%	0,0%	76%	102%	0%	101,50%
IKP 4.	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	71%	22%	49,21%	85%	52%	33%	97%	70%	26,97%
Total		25%	10%	15%	69%	26%	43%	82,5%	42,13%	42,80%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 82,5% dengan capaian keuangan sebesar 42,13% menunjukkan angka efisiensi sebesar 42,80%.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)

Tabel II.41 Rincian penggunaan sumber daya manusia Tahun 2025

No.	Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	Capaian SDM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	640	307	47,97%	100%	82,5%	82,5%

Sumber: Pengelola Kepegawaian

Berdasarkan tabel data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata target kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 82,5% menunjukkan capaian SDM sebesar 47,97% dengan realisasi sebesar 307 SDM dari jumlah kebutuhan SDM sebesar 640 SDM , dimana realisasi tersebut terdiri atas 165 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 88 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 54 Orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

3. Hambatan dan Kendala

Beberapa hambatan dan kendala masih rendahnya daya serap anggaran antara lain:

- Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran;
- Masih adanya beberapa kegiatan yang anggaran nya terkena blokir dikarenakan Efisiensi Anggaran;
- Masih terdapat Indikator Kinerja yang belum mencapai target dikarenakan kegiatan terkena Efisiensi Anggaran.



BAB III

PENUTUP

BAB III**PENUTUP****III.1. Ringkasan Capaian**

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Revisi I Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2025 ini terdapat 27 (Dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan terealisasi sebesar 9 Trayek (target 9 Trayek);
 - 2) Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM belum ada realisasi (target 1 Unit);
 - 3) Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM terealisasi 4 Unit (target 4 Unit);
 - 4) Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM terealisasi sebesar 1 Lokasi (target 3 Lokasi);
 - 5) Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM terealisasi 1 Tahun (target 1 Tahun);
 - 6) Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok terealisasi 3 Kegiatan (target 3 Kegiatan);
 - 7) Penyusunan Dokumen Terkait TUSI terealisasi belum ada realisasi (target 2 Kegiatan);
 - 8) Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata terealisasi 4 Kegiatan (target 4 Kegiatan);
 - 9) Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri belum ada realisasi (target 2 Kegiatan);
 - 10) Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin belum ada realisasi (target 2 Kegiatan);

- 11) Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan belum ada realisasi (target 2 Kegiatan);
 - 12) Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan terealisasi 2 Kegiatan (target 2 Kegiatan)
 - 13) Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan terealisasi 3 Lokasi (Target 3 Lokasi);
 - 14) Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman terealisasi 76 Kegiatan (72 Kegiatan);
 - 15) Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah terealisasi 3 Kegiatan (Target 8 Kegiatan);
 - 16) Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda terealisasi 203 Orang (Target 200 Orang);
 - 17) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 2 Kegiatan (Target 3 Kegiatan);
 - 18) Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 1 Dokumen (Target 1 Dokumen);
 - 19) Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan terealisasi 2 Kegiatan (Target 2 Kegiatan);
 - 20) Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 1 Kegiatan (Target 1 Kegiatan);
 - 21) Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan terealisasi 1 Kegiatan (Target 1 Dokumen);
 - 22) Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 2 Dokumen (Target 2 Dokumen);
 - 23) Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 2 Kegiatan (Target 2 Kegiatan);
 - 24) Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) terealisasi 1 Kegiatan (Target 1 Kegiatan);
 - 25) Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi 2 Kegiatan (Target 2 Kegiatan);
 - 26) Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja terealisasi 2 Kegiatan (Target 2 Kegiatan);
 - 27) Kegiatan mendukung Pembangunan ZI terealisasi 1 Kegiatan (Target 1 Kegiatan).
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.

3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *Zero Accident*.

III.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III.1 Tabel Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Realisasi Output	Indikator Kinerja Output	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
SK 2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	9	9	Terlayani Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Kegiatan layanan angkutan jalan perintis telah terlaksana dan telah mencapai realisasi dari target sebesar 9 Trayek.	Akan melaksanakan Kegiatan layanan angkutan jalan perintis sesuai Rencana Aksi.	Seksi Sarana
SK 7	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.1 Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1	0	Melaksanakan Revitalisasi Terminal Tipe A Alam Barajo;	Realisasi fisik Kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe A Alam Barajo telah mencapai 73,09%.	Rencana Kegiatan akan selesai terlaksana pada Bulan November Tahun 2025.	Seksi Prasarana
		IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	4	4	Melaksanakan operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM.	Kegiatan Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A sesuai SPM telah berjalan dengan baik, akan tetapi masih perlu dilaksanakan perawatan pada beberapa bagian gedung.	1. Peningkatan fasilitas pelayanan penumpang; 2. Penguatan SDM; 3. Perbaikan Sarana dan Prasarana.	Seksi Prasarana

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Realisasi Output	Indikator Kinerja Output	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
		IKK 7.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi	3	1	Melaksanakan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada 3 Lokasi UPPKB.	Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan telah terlaksana pada 1 Lokasi yaitu Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada UPPKB Jambi Merlung.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan akan dilaksanakan pada 2 Lokasi UPPKB lainnya.	Seksi Prasarana
		IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Tahun	1	1	Melaksanakan Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB pada UPPKB sesuai SPM.	1. Evaluasi pelayanan Operasional; 2. Evaluasi Sarana dan Prasarana; 3. Evaluasi SDM.	1. Menyusun dan melaksanakan survei kepuasan pelanggan secara berkala; 2. Menjamin operasional UPPKB sesuai regulasi dan SPM; 3. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan dan integritas petugas.	Seksi Prasarana
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	3	3	Melaksanakan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Agar pelaksanaan kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok kedepan dapat lebih baik.	Kegiatan telah terlaksana	Seksi Prasarana
									Seksi Lalin
									- Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Seksi Lalin

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Realisasi Output	Indikator Kinerja Output	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
		IKK 7.7 Penyusunan Dokumen Terkait TUSI	Kegiatan	2	0	Melaksanakan Penyusunan Dokumen UKL-UPL Revitalisasi Terminal Tipe A Alam Barajo dan Penyusunan Dokumen Andalalin	Pelaksanaan Kegiatan tersebut sampai tahap audiensi dengan stakeholder terkait.	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai timeline.	Seksi Prasarana
SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	4	4	Melaksanakan Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata.	1. Pelaksanaan evaluasi legalitas operasional kendaraan; 2. Melaksanakan Evaluasi Kelaikan Kendaraan; 3. Melaksanakan Evaluasi Kompetensi dan Kepatuhan Pengemudi; 4. Kegiatan tersebut menggunakan anggaran Monitoring Pengendalian Lalu Lintas.	1. Penegakan hukum atas penyalahgunaan izin pariwisata dan edukasi kepada operator; 2. Kewajiban PO menyediakan informasi standar sesuai SPM dalam armadanya; 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan lapangan.	Seksi Sarana

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Realisasi Output	Indikator Kinerja Output	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
		IKK 9.xx Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	2	0	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	1. Memastikan bengkel karoseri beroperasi secara legal dan sesuai peraturan; 2. Menjamin kualitas dan keselamatan kendaraan hasil karoseri; 3. Mencegah terjadinya kendaraan ODOL dan modifikasi ilegal; 4. Meningkatkan profesionalisme bengkel karoseri melalui pembinaan; 5. Kegiatan tersebut menggunakan anggaran Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas Dan Angkutan	Rencana Pelaksanaan Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada bulan September dan Oktober.	Seksi Lalin

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Realisasi Output	Indikator Kinerja Output	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
		IKK 9.xx Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	2	0	Melaksanakan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	1. Mengukur efektivitas rekayasa lalu lintas dalam mengatasi permasalahan lalu lintas; 2. Memastikan kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan MRLL; 3. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan manajemen lalu lintas yang berkelanjutan.	1. Melengkapi sarana dan prasarana rekayasa lalu lintas sesuai standar dan evaluasi lapangan; 2. Meningkatkan frekuensi pengawasan dan penindakan pelanggaran MRLL secara terpadu.	
		IKK 9.xx Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	2	0	Melaksanakan Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional Kota Jambi.	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.	1. Inventarisasi kondisi eksisting, pengusulan pengadaan/penggantian perlengkapan jalan ke instansi teknis; 2. Menyusun sistem pelaporan (format inspeksi, foto, titik koordinat) secara berkala.	

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Realisasi Output	Indikator Kinerja Output	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
		IKK 9.xx Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	2	2	Melaksanakan Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional Kota Jambi (Jl. Lingkar Barat dan Selatan)	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.	1. Menjamin fungsi perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, dll) berjalan optimal demi keselamatan pengguna jalan; 2. Meningkatkan respons cepat terhadap kerusakan atau kehilangan perlengkapan jalan.	Seksi Prasarana
		IKK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	3	3	Melaksanakan Kegiatan Operasional Fasilitas Penimbangan KB di 3 Lokasi UPPKB.	1. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Operasional Harian; 2. Melaksanakan Evaluasi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).	Penegakan SOP penundaan perjalanan, bongkar muat, dan penindakan administratif.	
SK10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	72	76	Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.	1. Meningkatkan integritas dan profesionalisme petugas pemeriksa; 2. Mendukung kebijakan Zero ODOL dan keselamatan transportasi darat.	Seksi Sarana
		IKK 10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi	Kegiatan	8	3	Melaksanakan Kegiatan kalibrasi	Anggaran kegiatan tersebut diblokir	1. Mendukung pengawasan dan	Seksi Sarana

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Realisasi Output	Indikator Kinerja Output	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
		alat uji berkala di daerah			0	alat uji berkala di wilayah Provinsi Jambi.	dikarenakan efisiensi anggaran.	pengendalian kendaraan bermuatan besar dan berpotensi ODOL; 2. Menjamin keabsahan hasil uji berkala kendaraan bermotor.	
						Kegiatan Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	Anggaran kegiatan diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.	Rencana pelaksanaan kegiatan tersebut akan terlaksana pada Bulan Agustus.	
SK 12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	200	203	Kegiatan pengajaran Keselamatan LLAJ di Provinsi Jambi (SALUD)	Anggaran kegiatan diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.	Kegiatan telah berjalan dengan baik dan akan terus dilaksanakan untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini.	Seksi Sarana
IKP4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	2	Melaksanakan penyusunan Dokumen RKKL Pagu Kebutuhan,	Pentingnya penyempurnaan proses penyusunan RKKL di tahun anggaran berikutnya.	1. Penajaman substansi kegiatan dan penyusunan TOR/RAB yang mengacu pada Renstra;	Subbag TU

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Realisasi Output	Indikator Kinerja Output	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Pagu Indikatif dan Pagu Alokasi.		2. Melakukan review dan penyesuaian prioritas kegiatan berbasis hasil evaluasi tahun sebelumnya.	
		IKK4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	1	Melaksanakan Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2025.	Masih ditemukan kendala dikarenakan belum ada manual indikator kinerja terbaru pada Dokumen Sakip Tahun 2025.	1. Revisi indikator kinerja agar memenuhi prinsip SMART dan selaras dengan sasaran strategis Renstra; 2. Revisi indikator kinerja agar didukung dengan manual IKU yang tepat dan jelas.	
		IKK4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan, Dokumen	2	2	Melaksanakan Penyusunan Dokumen SPIP dan Dokumen Manajemen Resiko.	Sebagian pegawai belum memahami konsep dasar SPIP dan manajemen risiko, sehingga penyusunan dokumen masih tergantung pada tim kecil.	1. Meningkatkan maturitas SPIP; 2. Mewujudkan pengelolaan risiko yang terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi.	
		IKK4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1	Pelaksanaan Anggaran BPTD Kelas II Jambi.	Meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran	1. Menindaklanjuti temuan evaluasi, baik internal maupun eksternal; 2. Menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.	

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Realisasi Output	Indikator Kinerja Output	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
		IKK4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	1	Melaksanakan Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Berbasis Resiko.	Kualitas Tindak Lanjut.	Dokumentasi output lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.	
		IKK4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	2	Melaksanakan Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset dan Penatausahaan BMN.	Mengukur keakuratan data dan laporan BMN.	1. Menjamin keakuratan dan kelengkapan data BMN; 2. Memperkuat pengendalian, pengamanan, dan pemanfaatan BMN.	
		IKK4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2	2	Melaksanakan Kegiatan HUMAS dan PPID.	1. Posting rutin tapi engagement rendah; 2. Materi terbatas dan kurang variatif.	1. Peningkatan frekuensi dan kualitas konten informasi publik; 2. Permintaan informasi ditangani cepat dan tepat.	
		IKK4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	1	Melaksanakan Kegiatan layanan perkantoran	Risiko kehilangan atau kebocoran data.	1. Melakukan backup dan pengamanan arsip digital secara berkala; 2. Monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan digitalisasi.	

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Realisasi Output	Indikator Kinerja Output	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
		IKK4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	2	2	Melaksanakan Kegiatan Belanja Bahan (Belanja Keperluan Kantor) dan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK).	Identifikasi hambatan, penyimpangan, atau risiko dalam tata kelola Pengadaan Barang Jasa.	Meningkatkan serapan anggaran dan kualitas output pengadaan.	
		IKK4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2	2	Melaksanakan Kegiatan terkait Pengembangan SDM.	Memastikan bahwa program pengembangan SDM tepat sasaran, relevan, dan berdampak langsung.	1. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pengembangan SDM; 2. Meningkatkan dampak pelatihan terhadap kinerja individu dan organisasi.	
		IKK4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	1	Melaksanakan Kegiatan pembangunan ZI/WBK/WBBM	SOP belum disosialisasikan atau dilaksanakan konsisten.	1. Meningkatkan nilai evaluasi LKE dari Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Nasional; 2. Memastikan keberlanjutan dan internalisasi budaya kerja anti korupsi dan pelayanan prima.	



LAMPIRAN



RENCANA KINERJA TAHUNAN

20 25

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2.	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	88
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	57
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.800
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4.	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Jambi, 1 Desember 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007



Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Pande Gede Semarapura, S.Kom., M.Si.	Penyusun Rencana dan Pelaporan	06/01/2025	
		Dina Safitri, S.H.	Jasa Keahlian Teknis dan Administrasi Bidang Transportasi Darat	06/01/2025	
2.	Disetujui	Alexander T.P. Pardede	Kepala Subbagian Tata Usaha	6/1/2025	
		Herry Wanda	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	6/1/2025	
		Ikra Surantha, S.T., M.T.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	6/1/2025	
		Riskan, A.Md LLAJ, S.E., M.M.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	6/1/2025	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 6 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	88
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	57
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.800
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 10.429.810.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 11.468.791.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 22.167.935.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.067.251.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 242.000.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.254.393.000
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 23.776.893.000

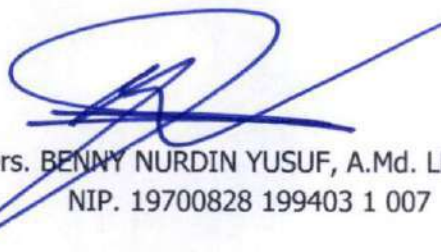
Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Jambi, 6 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II JambiDr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 16 Juni 2025

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 16 Juni 2025

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1.	SK 2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	9
2.	SK 7	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1
			IKK 7.2	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	4
			IKK 7.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi	3
			IKK 7.4	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Tahun	1
			IKK 7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	3
			IKK 7.7	Penyusunan Dokumen Terkait TUSI	Kegiatan	2
3.	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	4
			IKK 9.a	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	2
			IKK 9.b	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	2
			IKK 9.c	Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	2
			IKK 9.d	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	2
			IKK 9.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	3

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	SK 10 Meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	72
		IKK 10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan, Paket	8
5	SK12 Meningkatkan kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	200
6	IKP4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1
		IKK4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan, Dokumen	2
		IKK4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1
		IKK4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1
		IKK4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2
		IKK4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2
		IKK4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1
		IKK4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	2
		IKK4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2
		IKK4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK 2 Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	9
2.	SK 7 Meningkatkan pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.1 Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1
		IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	4
		IKK 7.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi	3
		IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Tahun	1
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	3
		IKK 7.7 Penyusunan Dokumen Terkait TUSI	Kegiatan	2
3.	SK 9 Meningkatkan Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	4
		IKK 9.a Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	2
		IKK 9.b Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	2
		IKK 9.c Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	2
		IKK 9.d Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	2
		IKK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	3

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
4.	SK 10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	72
			IKK 10.2	Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan, Paket	8
5	SK12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	200
6	IKP4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
			IKK4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1
			IKK4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan, Dokumen	2
			IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1
			IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1
			IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2
			IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2
			IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1
			IKK4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	2
			IKK4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2
			IKK4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1

KEGIATAN**ANGGARAN**

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 10.429.810.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 11.468.791.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 22.167.935.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.067.251.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 242.000.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.254.393.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 23.776.893.000

Pihak Kedua

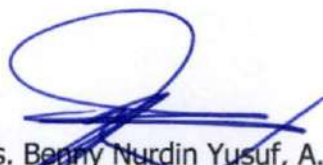
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Jambi, 16 Juni 2025

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 10.429.810.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 11.468.791.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 22.167.935.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.067.251.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 242.000.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.254.393.000
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 23.776.893.000

Pihak Kedua

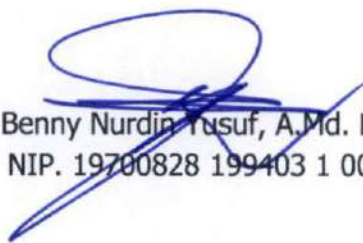
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.
NIP. 19670131/202521 1 001

Jambi, 16 Juni 2025

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007



**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab	
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	1. Kegiatan layanan angkutan jalan perintis	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	4.799.830.000	- Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A, yaitu: - Terminal Alam Barajo - Terminal Sribulan Sarolangun - Terminal Bangko Merangin - Terminal Bungo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8.119.721.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	1. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di BPTD Kelas II Jambi: - Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal - Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo - Pelabuhan Sungai Nipah Panjang - Pelabuhan Sungai Mendahara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1.349.070.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	88	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	88	453.360.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	57	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	57	197.650.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	11.159.000.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
						2. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)													949.028.000	
						3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional)													1.520.000.000	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	40	1. Pelaksanaan perbandingan jumlah angkutan barang yang melanggar di UPPKB terhadap jumlah lalu lintas harian rata-rata angkutan barang di UPPKB. Adapun pelaksanaan dilaksanakan pada UPPKB sebagai berikut: 1. UPPKB Jambi Merlung; 2. UPPKB Tembesi; 3. UPPKB Pelawan Sarolangun; 4. UPPKB Sungai Penuh (Tidak beroperasi).	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	6.363.734.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.800	1. Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	900	900	-	-	250.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50	1. Pelaksanaan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	45	50	217.160.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari (1 Paket)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1.000.000.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	80	90	4.067.251.000	Subbag Tata Usaha
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Program Dukungan Manajemen	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	80	90	30.273.286.000	Subbag Tata Usaha

Jambi, 6 Januari 2025
Kepala BPTD Kelas II Jambi

Dr. Drs. BENNY NORDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007



**REVISI I RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
SK 2.	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	Trayek	9	1. Kegiatan layanan angkutan jalan perintis dengan trayek sebagai berikut: 1. Layanan Subsidi Perintis Trayek Desa Sungai Jernih - Terminal Tipe C Rimbo Bujang; 2. Layanan Subsidi Perintis Trayek Desa Belukar Panjang - Terminal Muara Bungo; 3. Layanan Subsidi Perintis Trayek Desa Sari Mulya - Terminal Muara Bungo; 4. Layanan Subsidi Perintis Trayek Desa Suo - Suo - Terminal Tipe C Rimbo Bujang; 5. Layanan Subsidi Perintis Trayek Desa Pemayungan - Terminal Tipe C Rimbo Bujang; 6. Layanan Subsidi Perintis Trayek Desa Mekar Jaya - Terminal Tipe A Alam Barajo; 7. Layanan Subsidi Perintis Trayek Kelurahan Mendahara Ilir - Pasar Kamis; 8. Layanan Subsidi Perintis Trayek Kelurahan Simpang - Pasar Kamis; 9. Layanan Subsidi Perintis Trayek Desa Panca Karya - Terminal Sribulan Sarolangun.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	2.603.900.000	Seksi Sarana
SK 7	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.1 Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1	1. Revitalisasi Terminal Tipe A Alam Barajo;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1.908.893.000	Seksi Prasarana
		IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	4	1. Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A Alam Barajo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5.418.510.000	Seksi Prasarana
					2. Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A Sribulan Sarolangun;														
					3. Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A Bangko;														
					4. Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A Muara Bungo.														
		IKK 7.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi	3	1. Rehabilitasi Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB Jambi Merlung (Pemeliharaan Gedung dan Bangunan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	50.000.000	Seksi Prasarana
					2. Rehabilitasi Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB Muara Tembesi (Pemeliharaan Gedung dan Bangunan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	314.319.000		
					3. Rehabilitasi Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB Pelawan Sarolangun (Pemeliharaan Gedung dan Bangunan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	50.000.000		
		IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Tahun	1	1. Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB Jambi Merlung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4.288.289.000	Seksi Prasarana
					2. Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Muara Tembesi														
3. Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB Pelawan Sarolangun																			

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab	
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	3	1. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	15.104.000	Seksi Prasarana	
					2. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8.000.000	Seksi Lalin	
					3. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	31.970.000	- Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Seksi Lalin	
		IKK 7.7 Penyusunan Dokumen Terkait TUSI	Kegiatan	2	1. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Revitalisasi Terminal Tipe A Alam Barajo	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	99.300.000	Seksi Prasarana	
					2. Penyusunan Dokumen Andalalin	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	99.200.000		
SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	4	1. Ramp Check AKAP, AJAP, dan Pariwisata di Terminal Alam Barajo;	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	8.000.000	Seksi Sarana	
					2. Ramp Check AKAP, AJAP, dan Pariwisata di Terminal Sri Bulan Sarolangun	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1			
					3. Ramp Check AKAP, AJAP, dan Pariwisata di Terminal Bangko	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1			
					4. Ramp Check AKAP, AJAP, dan Pariwisata di Terminal Muara Bungo	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1			
		IKK 9.xx Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	2	1. Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri di Kota Jambi dan Luar Kota Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	31.970.000	Seksi Lalin	
		IKK 9.xx Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	2	1. Kegiatan Pengawasan Andalalin di Kota Jambi	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	8.000.000		
		IKK 9.xx Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	2	1. Kegiatan Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional Kota Jambi	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	Anggaran kegiatan diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.		
		IKK 9.xx Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	2	1. Kegiatan Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional Kota Jambi (Jl. Lingkar Barat dan Selatan)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	Anggaran kegiatan diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.		
		IKK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	3	1. Kegiatan Operasional Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB Jambi Merlung	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4.288.289.000		Seksi Prasarana
					2. Kegiatan Operasional Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB Muara Tembesi															
					3. Kegiatan Operasional Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB Pelawan Sarolangun															
		SK10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	72	Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	Anggaran kegiatan diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.
IKK 10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan			8	1. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Kota Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Anggaran kegiatan diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.	Seksi Sarana
					2. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kab. Muaro Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
					3. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
					4. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kab. Sarolangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
					5. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kab. Merangin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
					6. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kab. Tebo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
					7. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kab. Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
					1. Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Anggaran kegiatan diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab	
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
SK 12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	200	1. Pelaksanaan kegiatan pengajaran Keselamatan LLAJ di Provinsi Jambi	20	40	60	80	100	110	120	130	140	150	180	200	Anggaran kegiatan diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.	Seksi Sarana	
IKP4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anggaran kegiatan Pengelolaan Bidang Ketatausahaan diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.	Subbag TU	
					2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
					3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
		IKK4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	1. Penyusunan Dokumen SAKIP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Anggaran kegiatan Pengelolaan Bidang Ketatausahaan diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.		
		IKK4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan, Dokumen	2	1. Penyusunan SPIP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Anggaran kegiatan Pengelolaan Bidang Ketatausahaan diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.		
					2. Penyusunan Dokumen MR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Anggaran kegiatan Pengelolaan Bidang Ketatausahaan diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.		
		IKK4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1. Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Anggaran kegiatan Pengelolaan Bidang Ketatausahaan diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.		
		IKK4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	1. Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
		IKK4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	1. Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Anggaran kegiatan Pengelolaan Bidang Ketatausahaan diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.
					2. Kegiatan Penatausahaan BMN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Anggaran kegiatan Pengelolaan Bidang Ketatausahaan diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.		
		IKK4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2	1. Kegiatan HUMAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Anggaran kegiatan Pengelolaan Bidang Ketatausahaan diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.
					2. Kegiatan PPID	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		IKK4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	1. Kegiatan Digitalisasi Arsip layanan perkantoran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3.238.522.000
		IKK4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	2	1. Kegiatan Belanja Bahan (Belanja Keerluan Kantor);	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		60.000.000
2. Kegiatan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK).	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000				
IKK4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2	1. Kegiatan terkait Pengelolaan Gaji Tunjangan Pegawai	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27.027.280.000			
			2. Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-				
IKK4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	1. Kegiatan pembangunan ZI/WBK/WBBM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-			

Jambi, 16 Juni 2025
Kepala BPTD Kelas II Jambi



Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-9				Realisasi Bulan-9		Capaian Bulan-9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
SK 2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	RKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	9	1. Kegiatan layanan angkutan jalan perintis dengan trayek sebagai berikut: 1. Layanan Subsidi Perintis Trayek Desa Sungai Jernih - Terminal Tipe C Rimbo Bujang; 2. Layanan Subsidi Perintis Trayek Desa Belukar Panjang - Terminal Muara Bungo; 3. Layanan Subsidi Perintis Trayek Desa Sari Mulya - Terminal Muara Bungo; 4. Layanan Subsidi Perintis Trayek Desa Suo - Suo - Terminal Tipe C Rimbo Bujang; 5. Layanan Subsidi Perintis Trayek Desa Pemayungan - Terminal Tipe C Rimbo Bujang; 6. Layanan Subsidi Perintis Trayek Desa Mekar Jaya - Terminal Tipe A Alam Barajo; 7. Layanan Subsidi Perintis Trayek Kelurahan Mendahara Iir - Pasar Kamis; 8. Layanan Subsidi Perintis Trayek Kelurahan Simpang - Pasar Kamis; 9. Layanan Subsidi Perintis Trayek Desa Panca Karya - Terminal Sribulan Sarolangun.	Terdayani Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Tercapainya target trayek kegiatan layanan angkutan jalan perintis.	9	100	2.603.900.000	100	9	1.530.787.478	100%	58,79%	Kegiatan layanan angkutan jalan perintis telah terlaksana dan telah mencapai realisasi dari target sebesar 9 Trayek.	Akan melaksanakan Kegiatan layanan angkutan jalan perintis sesuai Rencana Aksi.	Seksi Sarana
SK 7	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	RKK 7.1 Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1	1. Revitalisasi Terminal Tipe A Alam Barajo;	Melaksanakan Revitalisasi Terminal Tipe A Alam Barajo;	Tertaksananya kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe A Alam Barajo	1	100	1.908.893.000	100	0	1.000.217.392	0%	52,40%	Realisasi fisik Kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe A Alam Barajo telah mencapai 73,09%.	Rencana Kegiatan akan selesai terlaksana pada Bulan November Tahun 2025.	Seksi Prasarana
		RKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	4	1. Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A Alam Barajo 2. Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A Sribulan Sarolangun; 3. Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A Bangko; 4. Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A Muara Bungo.	Melaksanakan operasional layanan Terminal Tipe A sesuai SPM.	Tertaksananya Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A sesuai SPM	4	100	5.678.510.000	100	4	3.343.317.829	100%	58,88%	Kegiatan Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A sesuai SPM telah berjalan dengan baik, akan tetapi masih perlu dilaksanakan perawatan pada beberapa bagian gedung.	1. Peningkatan fasilitas pelayanan penumpang; 2. Penguatan SDM; 3. Perbaikan Sarana dan Prasarana.	Seksi Prasarana
		RKK 7.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi	3	1. Rehabilitasi Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB Jambi Merlung (Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) 2. Rehabilitasi Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB Muara Tembesi (Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) 3. Rehabilitasi Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB Pelawan Sarolangun (Pemeliharaan Gedung dan Bangunan)	Melaksanakan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada 3 Lokasi UPPKB.	Meningkatnya Fasilitas Penimbangan KB untuk memenuhi SPM.	3	100	435.819.000	100	1	229.510.000	33%	52,66%	Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan telah terlaksana pada 1 Lokasi yaitu Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada UPPKB Jambi Merlung.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan akan dilaksanakan pada 2 Lokasi UPPKB lainnya.	Seksi Prasarana
		RKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Tahun	1	1. Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB Jambi Merlung 2. Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB UPPKB Muara Tembesi 3. Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB Pelawan Sarolangun	Melaksanakan Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB pada UPPKB sesuai SPM.	Tertaksananya Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB sesuai SPM	1	100	4.288.289.000	100	1	2.969.949.666	100%	69,26%	1. Evaluasi pelayanan Operasional; 2. Evaluasi Sarana dan Prasarana; 3. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan dan integritas petugas.	1. Menyusun dan melaksanakan survei kepuasan pelanggan secara berkala; 2. Menjamin operasional UPPKB sesuai regulasi dan SPM; 3. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan dan integritas petugas.	Seksi Prasarana
		RKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	3	1. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana 2. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 3. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan	Melaksanakan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok.	Tertaksananya Monitoring Evaluasi guna Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok, yaitu: 1. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; 2. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas; 3. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan	3	100	55.074.000	100	3	55.073.500	100%	100%	Agar pelaksanaan kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok kedepannya dapat lebih baik.	Kegiatan telah terlaksana	Seksi Prasarana Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Seksi Lalin
		RKK 7.7 Penyusunan Dokumen Terkait TUSI	Kegiatan	2	1. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Revitalisasi Terminal Tipe A Alam Barajo 2. Penyusunan Dokumen Andalain	Melaksanakan Penyusunan Dokumen UKL-UPL Revitalisasi Terminal Tipe A Alam Barajo dan Penyusunan Dokumen Andalain	Tersusunnya Dokumen UKL-UPL Revitalisasi Terminal Tipe A Alam Barajo dan Dokumen Andalain	2	100	99.300.000 99.200.000	100	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%	Pelaksanaan Kegiatan tersebut sampai tahap audiensi dengan stakeholder terkait.	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai timeline.	Seksi Prasarana
SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	RKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Parwisata	Kegiatan	4	1. Ramp Check AKAP, AJAP, dan Parwisata di Terminal Alam Barajo; 2. Ramp Check AKAP, AJAP, dan Parwisata di Terminal Sri Bulan Sarolangun 3. Ramp Check AKAP, AJAP, dan Parwisata di Terminal Bangko 4. Ramp Check AKAP, AJAP, dan Parwisata di Terminal Muara Bungo	Melaksanakan Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Parwisata.	Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan Pemeriksaan Kelainan Teknis dan Administrasi Kendaraan untuk menjamin keselamatan dari setiap kendaraan	4	100	8.000.000	100	4	8.000.000	100%	100%	1. Pelaksanaan evaluasi kegiatan operasional kendaraan; 2. Melaksanakan Evaluasi Kelainan Kendaraan; 3. Melaksanakan Evaluasi Kompetensi dan Kepatuhan Pengemudi; 4. Kegiatan tersebut menggunakan anggaran Monitoring Pengendalian Lalu Lintas.	1. Pengenaan hukum atas pelanggaran zon parwisata dan edukasi kepada operator; 2. Kewajiban PO menyediakan informasi standar sesuai SPM dalam amandanya; 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan lapangan.	Seksi Sarana

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-9				Realisasi Bulan-9		Capaian Bulan-9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%								Volume
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		IKK 9.xx Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	2	1. Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri di Kota Jambi dan Luar Kota Jambi	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan tersebut bertujuan meminimalkan pelanggaran dimensi kendaraan yang menyebabkan ODOL yang dapat membahayakan keselamatan pengguna lalu lintas jalan	2	100		31.970.000	100	0	31.970.000	0%	100%	1. Memastikan bengkel karoseri beroperasi secara legal dan sesuai peraturan; 2. Menjamin kualitas dan keselamatan kendaraan hasil karoseri; 3. Mencegah terjadinya kendaraan ODOL dan modifikasi ilegal; 4. Meningkatkan profesionalisme bengkel karoseri melalui pembinaan; 5. Kegiatan tersebut menggunakan anggaran Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas Dan	Rencana Pelaksanaan Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada bulan September dan Oktober.	Seksi Lain
		IKK 9.xx Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalin	Kegiatan	2	1. Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalin	Melaksanakan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalin	Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan beserta dampaknya sesuai dengan indikator jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	2	100		8.000.000	100	0	8.000.000	0%	100%	1. Mengukur efektivitas rekayasa lalu lintas dalam mengatasi permasalahan lalu lintas; 2. Memastikan kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan MRLL; 3. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan manajemen lalu lintas yang berkelanjutan.	1. Melakukan sarana dan prasarana rekayasa lalu lintas sesuai standar dan evaluasi lapangan; 2. Meningkatkan frekuensi pengawasan dan pendindakan pelanggaran MRLL secara terpadu.	
		IKK 9.xx Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlempangan Jalan	Kegiatan	2	1. Kegiatan Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlempangan Jalan Ruas Jalan Nasional Kota Jambi	Melaksanakan Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlempangan Jalan Ruas Jalan Nasional Kota Jambi.	Tertaksananya Pengadaan Perlempangan Jalan Ruas Jalan Nasional Kota Jambi sesuai target perencanaan dan kebutuhan.	2	100		0	0	0	0	0%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.	1. Inventarisasi kondisi pemblokiran/penghentian perlempangan jalan ke instansi teknis; 2. Menyusun sistem pelaporan (format inspeksi, foto, titik koordinat) secara berkala.	
		IKK 9.xx Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlempangan Jalan	Kegiatan	2	1. Kegiatan Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlempangan Jalan Ruas Jalan Nasional Kota Jambi (Jl. Lingkar Barat dan Selatan)	Melaksanakan Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlempangan Jalan Ruas Jalan Nasional Kota Jambi (Jl. Lingkar Barat dan Selatan)	Tertaksananya Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlempangan Jalan Ruas Jalan Nasional Kota Jambi (Jl. Lingkar Barat dan Selatan)	2	100		0	0	2	0	100%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.	1. Menjamin fungsi perlempangan jalan (rambu, marka, guardrail, dll) berjalan optimal demi keselamatan pengguna jalan; 2. Meningkatkan respons cepat terhadap kerusakan atau kehilangan perlempangan jalan.	
		IKK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dipersonalkan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	3	1. Kegiatan Operasional Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB Jambi Merlung 2. Kegiatan Operasional Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB Muara Tembesi 3. Kegiatan Operasional Fasilitas Penimbangan KB di UPPKB Pelawan Sarolangun	Melaksanakan Kegiatan Operasional Fasilitas Penimbangan KB di 3 Lokasi UPPKB.	Tertaksananya Kegiatan Operasional Fasilitas Penimbangan KB di 3 Lokasi UPPKB dengan baik.	3	100		4.693.289.000	100	3	2.969.949.666	100%	63,28%	1. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Operasional Harian; 2. Melaksanakan Evaluasi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).	Pengakan SOP penundaan perjalanan, bongkar muat, dan pendindakan administratif.	Seksi Prasarana
SK10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisk Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	72	Kegiatan Pemeriksaan Fisk Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan Fisk Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Tertaksananya Kegiatan Pemeriksaan Fisk Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	72	100		0	0	76	0	106%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.	1. Meningkatkan integritas dan profesionalisme petugas pemeriksa; 2. Mendukung kebijakan Zero ODOL dan keselamatan transportasi darat.	Seksi Sarana
		IKK 10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	8	1. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Kota Jambi 2. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kab. Muaro Jambi 3. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kab. Tanjung Jabung Barat 4. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kab. Sarolangun 5. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kab. Merangin 6. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kab. Tebo 7. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala Kab. Bungo 1. Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	Melaksanakan Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di wilayah Provinsi Jambi.	Tertaksananya Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di wilayah Provinsi Jambi sesuai Rencana aksi.	2	100		0	0	2	0	100%	0%	Anggaran kegiatan tersebut diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.	1. Mendukung pengawasan dan pengendalian kendaraan bermuatan besar dan berpotensi ODOL; 2. Menjamin keabsahan hasil uji berkala kendaraan bermotor.	Seksi Sarana
SK 12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	200	1. Pelaksanaan kegiatan pengajaran Keselamatan LLAJ di Provinsi Jambi	Kegiatan pengajaran Keselamatan LLAJ di Provinsi Jambi (SALUD)	Kegiatan bertujuan menanamkan kesadaran dan pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas sejak usia dini pada anak-anak. Ini dilakukan agar mereka menjadi generasi pengguna jalan yang disiplin, bertanggung jawab, dan memahami aturan lalu lintas.	200	100		0	0	203	0	102%	0%	Anggaran kegiatan diblokir dikarenakan efisiensi anggaran.	Kegiatan telah berjalan dengan baik dan akan terus dilaksanakan untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini.	Seksi Sarana
IKP4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemerhub	IKK4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dijen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan 2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif 3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi	Melaksanakan penyusunan Dokumen RKKL Pagu Kebutuhan, Pagu Indikatif dan Pagu Alokasi.	Tertaksananya penyusunan penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang tersusun secara sistematis dan rinci menurut klasifikasi agar dapat menghasilkan anggaran yang realistis dan efektif.	2	100		0	0	2	0	100%	0%	Pentingnya penyempurnaan proses penyusunan RKKL di tahun anggaran berikutnya.	1. Penajaman substansi kegiatan dan penyusunan TOR/RAB yang mengacu pada Renstra; 2. Melakukan review dan penyesuaian prioritas kegiatan berbasis hasil evaluasi tahun sebelumnya.	Subbag TU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-9				Realisasi Bulan-9		Capaian Bulan-9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		IKK4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Dijen Perhubungan Darat	Dokumen	1	1. Penyusunan Dokumen SAKIP	Melaksanakan Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2025.	1. Dokumen Renstra BPTD Kelas II Jambi 2025-2029; 2. Dokumen IKU; 3. Dokumen RKT; 4. Dokumen Perjanjian Kinerja; 5. Dokumen Rencana Aksi 6. Dokumen Lainnya yang diperlukan.	1	100	0	0	1	0	100%	0%	Masih ditemukan kendala dikarenakan belum ada manual indikator kinerja terbaru pada Dokumen Sakip Tahun 2025.	1. Revisi indikator kinerja agar memenuhi prinsip SMART dan selaras dengan sasaran strategis Renstra; 2. Revisi indikator kinerja agar didukung dengan manual IKU yang tepat dan jelas.	
		IKK4.3 Kegiatan terkait Maturlitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan, Dokumen	2	1. Penyusunan SPIP 2. Penyusunan Dokumen MR	Melaksanakan Penyusunan Dokumen SPIP dan Dokumen Manajemen Resiko.	1. Laporan Penilaian Mandiri Tingkat Maturlitas SPIP; 2. Matriks Risiko (Identifikasi Risiko, Dampak, Kemungkinan, Level Risiko, Mitigasi); 3. Dokumen Prosedur Operasional Standar yang mengatur proses SPIP dan manajemen risiko.	2	100	0	0	2	0	100%	0%	Sebagian pegawai belum memahami konsep dasar SPIP dan manajemen risiko, sehingga penyusunan dokumen masih tergantung pada tim kecil.	1. Meningkatkan maturlitas SPIP; 2. Mewujudkan pengelolaan risiko yang terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi.	
		IKK4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dijen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1. Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	Pelaksanaan Anggaran BPTD Kelas II Jambi.	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Monitoring Capaian Output via OM-SPAN / SMART DJA.	1	100	0	0	1	0	100%	0%	Meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran	1. Menindaklanjuti temuan evaluasi, baik internal maupun eksternal; 2. Menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.	
		IKK4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	1. Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	Melaksanakan Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Berbasis Resiko.	Laporan Dokumen Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Berbasis Resiko.	1	100	0	0	1	0	100%	0%	Kualitas Tindak Lanjut.	Dokumentasi output lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.	
		IKK4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Dijen Perhubungan Darat	Dokumen	2	1. Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset 2. Kegiatan Penatausahaan BMN	Melaksanakan Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset dan Penatausahaan BMN.	1. Laporan SIMAK-BMN sesuai ketentuan; 2. KIB sesuai SIMAK-BMN.	2	100	0	0	2	0	100%	0%	Mengukur keakuratan data dan laporan BMN.	1. Menjamin keakuratan dan kelengkapan data BMN; 2. Memperkuat pengendalian, pengamanan, dan pemantauan BMN.	
		IKK4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Dijen Perhubungan Darat	Kegiatan	2	1. Kegiatan HUMAS 2. Kegiatan PPID	Melaksanakan Kegiatan HUMAS dan PPID.	1. Pengelolaan media sosial dan website resmi; 2. Penyediaan dan pengelolaan akses informasi publik.	2	100	0	0	2	0	100%	0%	1. Posting rutin tapi engagement rendah; 2. Materi terbatas dan kurang variatif.	1. Peningkatan frekuensi dan kualitas konten informasi publik; 2. Permintaan informasi diangani cepat dan tepat.	
		IKK4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	1. Kegiatan layanan perkantoran	Melaksanakan Kegiatan layanan perkantoran	Tertaksananya Dokumen arsip yang terdigitalisasi.	1	100	3.448.522.000	100	1	2.364.318.985	100%	68,56%	Risiko kehilangan atau kebocoran data.	1. Melakukan backup dan pengamanan arsip digital secara berkala; 2. Monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan digitalisasi.	
		IKK4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	2	1. Kegiatan Belanja Bahan Operasional dan Pemeliharaan Kantor; 2. Kegiatan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor.	Melaksanakan Kegiatan Belanja Bahan (Belanja Keurluan Kantor) dan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK).	Pengelolaan data penyedia barang/jasa yang sesuai ketentuan	2	100	120.000.000 100.000.000	100	2	59.951.840 68.885.500	100%	49,96% 68,89%	Identifikasi hambatan, penyimpangan, atau risiko dalam tata kelola Pengadaan Barang Jasa.	Meningkatkan serapan anggaran dan kualitas output pengadaan.	
		IKK4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2	1. Kegiatan terkait Pengelolaan Gaji Tunjangan Pegawai 2. Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM	Melaksanakan Kegiatan terkait Pengembangan SDM.	1. Pembayaran Gaji Tunjangan Pegawai 2. Mengikuti kegiatan pada ASN Berpjar	2	100	27.027.280.000 0	100	2	19.114.272.274 0	100%	70,72% 0%	Memastikan bahwa program pemanfaatan anggaran pengembangan SDM tepat sasaran, relevan, dan berdampak langsung.	1. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pengembangan SDM; 2. Meningkatkan dampak pelatihan terhadap kinerja individu dan organisasi.	
		IKK4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan Zi	Kegiatan	1	1. Kegiatan pembangunan ZIWBK/WBBM	Melaksanakan Kegiatan pembangunan ZIWBK/WBBM	1. Kegiatan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.	1	100	0	0	1	0	100%	0%	SOP belum disosialisasikan atau dilaksanakan konsisten.	1. Meningkatkan nilai evaluasi LKE dari Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Nasional; 2. Memastikan keberlanjutan dan internalisasi budaya kerja anti korupsi dan pelayanan prima.	